



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**INSPEKTORAT DAERAH**

JL. A.P. Pettarani No. 100 Telp / FAX (0411) 453137 Makassar 90222

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK  
DAN PERSANDIAN PROV.SULSEL TA 2023 s.d 2024**

**NOMOR : 700.04/ 2592 / B.I /Itprov**  
**TANGGAL : 30 Juli 2024**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
INSPEKTORAT DAERAH**

JL. A.P. PETTARANI NO. 100 TELP. (0411) 453137-453628 MAKASSAR KODE POS 90222

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**

NOMOR : 700.04/2502/B.I/ITPROV  
TANGGAL : 30 Juli 2024  
LAMPIRAN : 1 (satu) RANGKAP  
TENTANG : PEMERIKSAAN PENGELOAAN KEUANGAN DAERAH  
PADA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK  
DAN PERSANDIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN : TAHUN ANGGARAN 2023 dan 2024  
(Keadaan Juni 2023 s.d. Mei 2024)

**BAB I. SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, serta Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 700/56/Inspektorat Tanggal 13 Juni 2024; Nomor 094/488/B.1/Itprov, tanggal 28 Juni 2024 dan Nomor 094/489/B.1/Itprov tanggal 28 Juni 2024. Tim Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode pemeriksaan SPJ bulan Juni 2023 s.d Mei 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 28 Juni 2024 dan dilanjutkan pemeriksaan uji petik di Kab/Kota pada tanggal 1 s.d 5 Juli 2024.

Dari hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari fokus: akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah, akuntabilitas pengelolaan belanja daerah, pengelolaan manajemen kas dan persediaan serta pengelolaan

barang milik daerah pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik, namun masih terdapat kelemahan yang perlu mendapat perbaikan dan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

#### **A. SIMPULAN**

Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2023 dan 2024 pada umumnya telah berjalan dengan baik, namun berdasarkan pemeriksaan ditemukan beberapa kelemahan yang perlu mendapat perbaikan/penyempurnaan, sebagai berikut :

1. Terdapat Belanja Kegiatan yang Belum Cukup dilengkapi Bukti Pertanggungjawaban senilai Rp58.005.000,00. (08)
2. Terdapat pembayaran biaya tiket pesawat melebihi Standar Harga Senilai Rp5.427.415,00 dan tidak dilengkapi pernyataan.
3. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp230.212.490,00 dengan Jumlah Personil dalam satu penugasan Perjalanan Dinas Melebihi Ketentuan.
4. Terdapat Barang Milik Daerah Yang Rusak Berat Senilai Rp898.204.000,00 Belum terbit SK Penghapusan.
5. Terdapat Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua yang tidak dihimpun/disimpan BPKB Serta STNK-nya.
6. Terdapat 28 (dua puluh delapan) Unit Kendaraan Dinas Roda Dua dan Roda Empat yang Menunggak Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp30.937.500,00.

#### **B. REKOMENDASI**

Disarankan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan agar mengambil langkah perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana direkomendasikan pada masing-masing temuan dalam Bab II LHP ini.

## **BAB II. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN**

### **A. DATA UMUM**

#### **1. Dasar Pemeriksaan :**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
- c. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 104/I/Tahun 2024 tanggal 23 Januari 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024;
- d. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 700/56/Inspektorat Tanggal 13 Juni 2024, untuk melakukan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan;
- e. Nomor Nomor 094/488/B.1/Itprov, tanggal 28 Juni 2024 dan Nomor 094/489/B.1/Itprov tanggal 28 Juni 2024, untuk melakukan pemeriksaan cek fisik/uji petik program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi di Kab/Kota.

#### **2. Tujuan Pemeriksaan :**

- a. Menilai efektifitas, efisiensi, ekonomis serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku atas pengelolaan keuangan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Memberi saran perbaikan atas kelemahan/kekurangan yang ditemukan.

### **3. Ruang Lingkup Pemeriksaan :**

Ruang lingkup pemeriksaan adalah pengelolaan keuangan daerah TA. 2023 dan 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari fokus pemeriksaan:

- a. Akuntabilitas pengelolaan Pendapatan Daerah
- b. Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah
- c. Pengelolaan Manajemen Kas dan Persediaan
- d. Pengelolaan Barang Milik Daerah

### **4. Metode dan Pendekatan Pemeriksaan**

Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan metode:

- a. Pengumpulan data melalui pemeriksaan dokumen dan tanya jawab.
- b. Analisis data melalui analisis prosedur, pengujian data, analisis hasil, survey dan analisis kuantitatif/komperatif.

Pendekatan dan metode pemeriksaan yang dilakukan memungkinkan merumuskan permasalahan substansial yang ditemui dalam pemeriksaan. Setiap permasalahan substansial dikomunikasikan kepada Kepala Dinas, Sekretaris Dinas/Kepala Bidang selaku PPTK, Kepala Sub Bagian, pendekatan ini memungkinkan memberikan rekomendasi konstruktif terhadap setiap permasalahan yang ditemui.

### **5. Susunan Tim Pemeriksa.**

- |                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| a. MARWAN MANSYUR, S.H., M.H.       | : Penanggungjawab   |
| b. Hj. ANDI RAHMANIA, SE., M.Si.    | : Supervisor        |
| c. Ir. MUH. HASRI, M.Si.            | : Pengendali Mutu   |
| d. MUH. IKRAMA, S.Sos.              | : Pengendali Teknis |
| e. MISBAHUDDIN, SE., M.Ak., CFrA.   | : Ketua Tim         |
| f. BAHARUDDIN, S.STP.               | : Anggota Tim       |
| g. ANDI MUTIA JUSTICIA, I.C., M.Si. | : Anggota Tim       |
| h. FATMAWATI, S.H.                  | : Anggota Tim       |
| i. JANA DIANA, S.Si., M.M.          | : Anggota Tim       |

## **6. Waktu Pemeriksaan**

Pemeriksaan dilaksanakan selama 8 (delapan) hari kerja, mulai tanggal 19 s.d. 28 Juni 2024 dan dilanjutkan pemeriksaan ujipetik di Kab/Kota selama 5 (lima) hari, mulai tanggal 1 s.d. 5 Juli 2024.

## **7. Sistematika Pelaporan.**

Laporan Hasil Pemeriksaan ini disusun dalam bentuk BAB, yakni :

a. Bab I Simpulan dan Rekomendasi, berisi :

- 1) Simpulan Hasil Pemeriksaan.
- 2) Rekomendasi.

b. Bab II Uraian Hasil Pemeriksaan.

- 1) Data Umum yang memuat dasar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, metode dan pendekatan pemeriksaan, susunan tim pemeriksa, sistematika pelaporan, data umum perangkat daerah sebagai auditi, realisasi keuangan APBD pada Perangkat Daerah, status penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- 2) Temuan Hasil Pemeriksaan.

c. Bab III Penutup.

## **8. Data Umum Perangkat Daerah sebagai Auditi**

a. Data Pengenal Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- 1) Nama : Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.
- 2) Alamat : Komplek Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Jl. Jenderal Urip Sumiharjo Makassar.

b. Pengguna Anggaran TA. 2023

- 1) Nama : Dra. Hj. SUKARNIATY KONDOLELE, M.M
- 2) NIP : 19650606 199003 2 011
- 3) Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya - IV/d

4) Jabatan : Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan

5) SK PA TA 2023 : SK Gub Nomor 2/II/Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023.

1) Nama : A. WINARNO EKA PUTRA, S.STP.,M.H

2) NIP : 19810716 200112 1 004

3) Pangkat/Gol : Pembina Tk.I - IV/b

4) Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan

5) SK PA TA 2023 : SK Gub Nomor 842/V/Tahun 2023 tanggal 9 Mei 2023.

c. Pengguna Anggaran TA. 2024

1) Nama : A. WINARNO EKA PUTRA, S.STP.,M.H

2) NIP : 19810716 200112 1 004

3) Pangkat/Gol : Pembina Tk.I - IV/b

4) Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan

5) SK Jabatan : SK Gub Nomor 821.22/6/2023 Tanggal 8 Mei 2023.

6) SK PA TA 2024 : SK Gub Nomor 1/II/Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024

d. Bendahara Penerimaan TA 2023 / 2024

1) Nama : Tidak Ada

2) NIP : Tidak Ada

3) Pangkat/Gol : Tidak Ada

4) No. dan Tgl SK : Tidak Ada

e. Bendahara Pengeluaran TA 2023

1) Nama : ROSMINI

2) NIP : 19841115 201212 2 002

3) Pangkat/Gol : Pengatur - II/c

- 4) No. dan Tgl SK : Nomor 2/I/Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023
- f. Bendahara Pengeluaran TA 2024.
- 1) Nama : ROSMINI
- 2) NIP : 19841115 201212 2 002
- 3) Pangkat/Gol : Penata Muda – III/a
- 4) No. dan Tgl SK : SK Gub Nomor 1/I/Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024
- g. Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK-OPD) TA 2023
- 1) Nama : ANDI FIRMAN DEGONG, SE
- 2) Nip : 19810510 201001 1 030
- 3) Pangkat : Penata Tk I - III/d
- 4) Jabatan : Kasubag. Keuangan Dinas Komunikasi Infomatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan
- 5) SK TA. 2023 : SK Plt. Kadis Kominfo SP Prov. Sulsel Nomor 188.4/06/Diskominfo-SP tanggal 6 Februari 2023
- h. Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK-OPD) TA 2024
- 1) Nama : ANDI FIRMAN DEGONG, SE
- 2) Nip : 19810510 201001 1 030
- 3) Pangkat : Penata Tk I - III/d
- 4) Jabatan : Kasubag. Keuangan Dinas Komunikasi Infomatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan
- 5) SK TA. 2023 : SK Kadis Kominfo SP Prov. Sulsel Nomor 188.4/171/Diskominfo-SP tanggal 2 Januari 2024
- i. Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) TA 2023 sesuai SK Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 188.4/ 04 /Diskominfo-SP, Tanggal 9 Januari 2023:



No	Nama / Nip/ Pangkat /Jabatan	Kegiatan
1	ERWIN WERIANTO, S.STP 19780102 199612 1 001 Pembina Tk.I Sekretaris Dinas	1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	YESSY YOANNA ARIESTIANI S.IP 19840406 201001 2 021 Penata Tk.I Kepala Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik	1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
3	IRVAN, S.STP.,M.Adm.,SDA 19800528 199810 1 001 Pembina Tk.I Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika	1) Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 2) Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
4	ANDI DIAH ISMIRANTI BASO,SE.M.Si 19760912 200212 2 012 Pembina Plt. Kepala Bidang Statistik	1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
5	SULTAN RAKIB S.S. MM 19761008 200901 1 007 Pembina Kepala Bidang Persandian	1) Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 2) Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi

j. Perubahan Pertama, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) TA 2023 sesuai SK Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 188.4/ 05 /Diskominfo-SP Tanggal 3 Februari 2023:

No	Nama / Nip/ Pangkat /Jabatan	Kegiatan
1	ERWIN WERIANTO, S.STP 19780102 199612 1 001 Pembina Tk.I Sekretaris Dinas	Tetap
2	YESSY YOANNA ARIESTIANI S.IP 19840406 201001 2 021 Penata Tk.I Kepala Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik	Tetap
3	IRVAN, S.STP.,M.Adm.,SDA 19800528 199810 1 001	Tetap

No	Nama / Nip/ Pangkat /Jabatan	Kegiatan
	Pembina Tk.I Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika	
4	Drs. FITRA, M.Adm.Pem 19760512 200003 1 005 Pembina Tk.I Kepala Bidang Statistik	1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
5	SULTAN RAKIB S.S. MM 19761008 200901 1 007 Pembina Kepala Bidang Persandian	Tetap

l. Perubahan Kedua, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) TA 2023 sesuai SK Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 188.4/137/Diskominfo-SP Tanggal 7 Juni 2023

No	Nama / Nip/ Pangkat /Jabatan	Kegiatan
1	ANDI TAUFIK, S.STP., M.Si 19830910 200112 1 001 Pembina Sekretaris Dinas	1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	YESSY YOANNA ARIESTIANI S.IP 19840406 201001 2 021 Penata Tk.I Kepala Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik	Tetap
3	IRVAN, S.STP.,M.Adm.,SDA 19800528 199810 1 001 Pembina Tk.I Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika	Tetap
4	Drs. FITRA, M.Adm.Pem 19760512 200003 1 005 Pembina Tk.I Kepala Bidang Statistik	Tetap
5	SULTAN RAKIB S.S. MM 19761008 200901 1 007 Pembina Kepala Bidang Persandian	Tetap

m. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) TA 2024 sesuai SK Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 188.4/177/Diskominfo SP, Tanggal  
2 Januari 2024:

No	Nama / Nip/ Pangkat /Jabatan	Kegiatan
1	ANDI TAUFIK, S.STP., M.Si 19830910 200112 1 001 Pembina Sekretaris Dinas	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	ERLAN TRISKA, S.I.P 198810152007011001 Penata Tk.I Kepala Bidang Komunikasi dan Humas	1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
3	SULTAN RAKIB S.S. MM 197610082009011007 Pembina Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika	1) Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 2) Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
4	ANDI DIAH ISMIRANTI BASO, SE.M.Si 197609122002122012 Pembina Kepala Bidang Statistik	1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
5	IRVAN, S.STP.,M.Adm.,SDA 198005281998101001 Pembina Tk.I Kepala Bidang Persandian	1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 2) Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi

n. Perubahan Pertama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) TA 2024 sesuai SK Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 188.4/172/Diskominfo SP, Tanggal 2 Februari 2024:

No	Nama / Nip/ Pangkat /Jabatan	Kegiatan
1	ANDI TAUFIK, S.STP., M.Si 19830910 200112 1 001	Tetap

No	Nama / Nip/ Pangkat /Jabatan	Kegiatan
	Pembina Sekretaris Dinas	
2	ERLAN TRISKA, S.I.P 19881015 200701 1 001 Penata Tk.I Kepala Bidang Komunikasi dan Humas	Tetap
3	SULTAN RAKIB S.S. MM 19761008 200901 1 007 Pembina Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika	Tetap
4	Drs. FITRA, M.Amd.Pemb 19760512 200003 1 005 Pembina Tk.I Kepala Bidang Statistik	1) Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Provinsi
5	IRVAN, S.STP.,M.Adm.,SDA 19800528 199810 1 001 Pembina Tk.I Kepala Bidang Persandian	Tetap

- o. Perubahan kedua Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) TA 2024 sesuai SK Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 188.4/160/Diskominfo SP, Tanggal 24 April 2024:

No	Nama / Nip/ Pangkat /Jabatan	Kegiatan
1	SULTAN RAKIB S.S. MM 19761008 200901 1 007 Pembina Sekretaris Dinas	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	Drs. FITRA, M.Amd.Pemb 19760512 200003 1 005 Pembina Tk.I Kepala Bidang Komunikasi dan Humas	1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
3	YULIANUS SONDA, SE., M.Si 19690216 198903 1 007 Pembina Tk.I	1) Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah

No	Nama / Nip/ Pangkat /Jabatan	Kegiatan
	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika	Daerah Provinsi 2) Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
4	MUHAMMAD SALIM BASMIN, S.H.,M.H. 19850918 201001 1 022 Kepala Bidang Statistik	1) Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Provinsi
5	Hj. HASNI ZAINAL, S.Sos.,M.Si 19730620 199803 2 012 Pembina Tk.I Kepala Bidang Persandian	1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 2) Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi

**9. Realisasi Keuangan APBD Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.**

**Tahun Anggaran 2023 (keadaan s.d. 31 Desember 2023)**

a. Pendapatan		
Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp	Tidak ada
Realisasi PAD	Rp	Tidak ada
Surplus/melebihi Target	Rp	==== NIHIL =====
Penerimaan Bendahara Penerimaan	Rp	Tidak ada
Penyetoran penerimaan	Rp	Tidak ada
Sisa Kas Bendahara Penerimaan	Rp	==== NIHIL =====
b. Belanja		
Anggaran Belanja dalam DPPA	Rp	,00
Realisasi Belanja s.d. 31 Desember 2023	Rp	<u>53.009.136.026,00</u>
Sisa Pagu Anggaran	Rp	,00
c. Penerimaan SP2D LS+UP/GU/TU	Rp	53.227.407.262,00
d. Pengeluaran:		
SPJ LS LS+UP/GU/TU	Rp	53.009.136.026,00
Pengembalian Sisa Kas/TU/Contra Pos	Rp	<u>216.953.136,00</u>
Jumlah Pengeluaran	Rp	53.226.089.162,00
e. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran		
Per 31 Des 2023 (c-d)	Rp	1.318.100,00
f. Penyetoran sisa Kas oleh Bendahara Pengeluaran		
STS B.IX No. 00847 Tgl 15 Jan 2024	Rp	1.318.100,00

**Tahun Anggaran 2024**

a. Pendapatan (Keadaan s.d. 20 Juni 2024)		
Target Pendapatan TA 2024	Rp	Tidak ada
Realisasi Pendapatan	Rp	Tidak ada
Sisa Pagu Target	Rp	Tidak ada

Penerimaan Bendahara Penerimaan	Rp	Tidak ada
Penyetoran penerimaan	Rp	Tidak ada
Sisa Kas Bendahara Penerimaan	Rp	==== NIHIL ====
b. Belanja (Keadaan s.d. 20 Juli 2024)		
Jumlah Anggaran Belanja dalam DPA	Rp	44.747.146.755,00
Realisasi Belanja	Rp	16.669.262.161,00
Sisa Pagu Anggaran	Rp	,00
c. Penerimaan SP2D LS+UP/GU/TU	Rp	16.717.136.066,00
d. Pengeluaran:		
SPJ LS LS+UP/GU/TU	Rp	16.669.262.161,00
e. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran		
Per 20 Juni 2024 (c-d)	Rp	47.873.905,00
f. Tidak terdapat Selisih kurang atau lebih saldo Kas antara saldo Bank dengan pencatatan BKU.		

#### 10. Status Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sebelumnya.

Data kompilasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan kondisi tanggal 31 Mei 2024 sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Temuan	Jmlh Reko	Status Tindak Lanjut			
				B	DP	S	%
1	Tahun Pemeriksaan 2023 LHP No: 700.04/6005/B.IV/Itprov Tgl 4 Des 2023 Tindak Lanjut sd. 4 Mar 2023	7	16	-	1	15	93,75%
2	Tahun Pemeriksaan 2022 LHP No: 700.04/3815/B.IV/Itprov Tgl 7 Sep 2023 Tindak Lanjut sd. 20 Nov 2022	11	18	-	2	16	88,89%
3	Tahun Pemeriksaan 2021 LHP No: 700.04/2809/B.III/Itprov Tgl 16 Juni 2021 Tindak Lanjut sd. 17 Agust 2023	25	36	-	-	36	100%

#### 11. Penyelesaian Tindak Lanjut Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan.

Berdasarkan Naskah Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) yang telah diserahkan kepada pihak Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 11 Juli 2024, telah mendapat tanggapan tertulis berdasarkan Surat Pengantar Sekretaris Dinas Nomor: 120.1/4032/Diskominfo-SP, Tanggal 19 Juli 2024 dan dibahas bersama pada hari Senin Tanggal 22 Juli 2024, sehingga terdapat

temuan yang dinyantakan tuntas ditindaklanjuti sebelum terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai berikut:

No	Temuan Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP)	Tanggapan Yang Dinyatakan Tuntas
1	Terdapat Belanja Kegiatan yang Belum Cukup dilengkapi Bukti Pertanggungjawaban.	<p>Telah ditanggapi dan telah dilengkapi bukti sebagian uraian temuan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk pembelian barang untuk dibagikan ke peserta seminar (BKU 01014, BKU 00700) sebesar Rp Rp39.596.400,00 telah dilengkapi penjelasan dan bukti memadai;</li> <li>- Untuk Belanja Pemeliharaan dan belanja barang (BKU 1008, BKU 1006) sebesar Rp40.390.000,00 telah dilengkapi penjelasan dan bukti memadai;</li> <li>- Untuk Belanja Perjalanan Dinas Personil Diskominfo yang tidak dilengkapi bukti berupa tiket pesawat BKU 2374 sebesar Rp896.050,00 pada saat tanggapan telah diperlihatkan bukti dimaksud;</li> <li>- Untuk Belanja Perjalanan Dinas Personil Diskominfo BKU 3419 sebesar Rp7.301.539,00 telah dilengkapi bukti rincian biaya perjalanan dinas dalam negeri dan daftar pengeluaran riil;</li> <li>- Untuk belanja perjalanan Dinas KPID ke Kab/Kota pada sebesar Rp8.000.000,00 telah dilengkapi bukti Bill Transportasi;</li> <li>- Belanja perjalanan dinas KPID sebesar Rp18.050.000,00 telah dilengkapi bukti visum pada pejabat yang dituju di Kabupaten Takalar.</li> </ul>
2	ASN melakukan Perjalanan Dinas Melebihi Hari Penugasan yang diberikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ahmad Tasyrif Arief, ST., MT atas izin atasan langsung;</li> <li>- Muhammad Yusup, S.Kom Menemani Saudara Ahmad Tasyrif atas izin atasan langsung;</li> </ul>
3	Belanja Perjalanan Dinas sebesar dengan Jumlah Personil dalam satu penugasan Perjalanan Dinas Melebihi Ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Perjalanan Dinas sebanyak 8 (delapan) orang personil, selama 4 hari dengan sebesar Rp16.960.000,00 merupakan perjalanan dinas teknis yang spesifik mengikuti jadwal dan agenda dalam rangka mendampingi PJ. Gubernur Sulsel, pada kegiatan pemantauan pelayanan inseminasi buatan, kesehatan ternak dan stabilitas harga di Kab Bone, Palopo, dan Kab Soppeng.</li> <li>- Staf KPID melakukan Perjalanan Dinas dalam rangka kunjungan kerja koordinasi sebanyak 18 (delapan belas) orang personil di Kab Gowa sebesar Rp9.540.000,00 merupakan perjalanan dinas teknis yang spesifik yaitu mendampingi Ketua KPID sulsel (Irwan Ade Saputra,S.IP,M.Si) untuk melakukan evaluasi dari program metro TV sekaligus melakukan verifikasi Factual kepada pemenang MUKS (Multipleksin ) TV Digital, Kunjungan komisioner Bersama staf ke lembaga penyiaran pemenang Muks Analog Switch Off atau</li> </ul>

No	Temuan Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP)	Tanggapan Yang Dinyatakan Tuntas
		<p>migrasi penyiaran analog ke siaran digital sesuai UU No 6 tentang cipta kerja.</p> <p>- KPID melakukan Perjalanan Dinas dalam rangka kunjungan kerja koordinasi sebanyak 4 (empat) orang personil sesuai ST Nomor SPT No. 094/21.1/ST/KPID-SS/XI/2023 Tanggal 1 November 2023, untuk satu tujuan penugasan di Kab Pinrang sebesar Rp8.760.000,00 bahwa hal tersebut merupakan perjalanan dinas teknis yang spesifik yaitu tugas pokok KPID Melakukan kunjungan kerja dalam rangka Monitoring dan evaluasi Lembaga penyiaran di Kab. Pinrang ke Kominfo Kab. Pinrang salah satunya Radio Suara Bumi Lasinrang.</p>
4	Terdapat Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor yang melebihi Standar Harga Satuan (SHS)	- Harga barang yang dimaksud telah sesuai dengan Standar Satuan Harga (SSH) TA 2022 yang ada pada SIPD Kemendagri untuk penyusunan RKA TA 2023 dan telah melalui verifikasi BKAD Bidang Aset serta pada proses pengadaan barang dilakukan melalui system e-purchasing Dimana telah melalui proses penawaran harga.
5	Terdapat Kekeliruan Perhitungan Masa kerja Golongan pada SK. Kenaikan Gaji Berkala PNS an. Muhammad Amin, A.Md/NIP 196806241989031007 Menimbulkan Kelebihan Pembayaran Gaji Sebesar Rp3.965.248,00.	- Telah ditindaklanjuti setoran ke Kas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan STS No BIX 21386 tanggal 24 Juli 2024 sebesar Rp3.965.248,00.
6	Terdapat 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Roda Dua dikuasai Oleh Pihak Lain.	Saat ini asset tersebut sudah dikuasai oleh Diskominfo-SP Prov. Sulsel, dibuktikan foto dokumentasi penyerahan yang diterima Kasubag Umum Dinas Kominfo/
7	Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan usulan (RKBMD) Pemeliharaan TA. 2025 Belum Dibuat.	Telah dibuat dan dilampirkan dalam tanggapan.
8	Kekurangan Volume Pekerjaan Pada Pekerjaan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Rumah Dinas dan dan Renovasi Ruang Kerja Senilai Rp2.082.360,00	Telah ditindaklanjuti setoran ke Kas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan STS No BIX 21680 tanggal 26 Juli 2024 sebesar Rp2.082.360,00.



## B. TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN

### I. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tidak mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada TA 2023 dan TA 2024.

### II. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

#### 1. Terdapat Belanja Kegiatan yang Belum Cukup dilengkapi Bukti Pertanggungjawaban senilai Rp58.005.000,00. (08)

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban periode bulan Juni 2023 s.d. Mei 2024, ditemukan bahwa terdapat belanja yang bukti pertanggungjawabannya belum cukup lengkap yaitu Belanja Langganan Koran / Media Cetak / Elektronik dan Media Online, pada sub kegiatan pengelolaan media komunikasi publik, yang tidak dilengkapi bukti yang cukup sebesar Rp58.005.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	No.Kwi/ BKU	Uraian Belanja	QTY	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1.	BKU : 00690/GU, kode rek 5.1.02.02.01.0055, tanggal 22 Juni 2023, pajak	Belanja langganan koran Harian "Rakyat Sulsel" untuk bulan januari 2023, nopes:sesuai SPK 748/1456/humas- IKP/Diskominfo-SP Tanggal 3 Januari 2023,PPTK:Yossi Yoanna, S.IP, M.AP an.pimp red/keu Evi Arvida	910  eksemp	4000/exp	3.640.000	- Tidak dilampirkan SK Penetapan Penyaluran ke OPD, disetiap bulannya. - Tidak melampirkan dokumentasi.
2.	BKU : 00691/GU, kode rek 5.1.02.02.01.0055, tanggal 22 Juni 2023,	Belanja langganan koran Harian "Radar Makassar" untuk bulan januari 2023, nopes:sesuai SPK 748/895/humas- IKP/Diskominfo-SP Tanggal 3 Januari 2023,PPTK:Yossi Yoanna, S.IP, M.AP an.pimp red/keu Nurfadillah	924  eksemp	5000/exp	4.620.000	- Tidak dilampirkan SK Penetapan Penyaluran ke OPD, disetiap bulannya. - Tidak melampirkan dokumentasi.
3.	BKU : 00692/GU, kode rek 5.1.02.02.01.0055, tanggal 22 Juni 2023,	Belanja langganan koran Harian "Berita Kota Makassar" untuk bulan januari 2023, nopes:sesuai SPK 748/890/humas- IKP/Diskominfo-SP Tanggal 3 Januari 2023,PPTK:Yossi Yoanna, S.IP, M.AP	968  eksemp	4000/exp	3,872.000	- Tidak dilampirkan SK Penetapan Penyaluran ke OPD, disetiap bulannya. - Tidak melampirkan dokumentasi.

No	No.Kwi/ BKU	Uraian Belanja	QTY	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
		an.pimp red/keu Jumaki Daraming				
4.	BKU : 00693/GU, kode rek 5.1.02.02.01.0055, tanggal 22 Juni 2023,	Belanja langganan koran Harian "Tribun Timur" untuk bulan januari 2023, nopes:sesuai SPK 748/900/humas- IKP/Diskominfo-SP Tanggal 3 Januari 2023,PPTK:Yossi Yoanna, S.IP, M.AP an.pimp Manager Op Sonny Maryanto(PT Bosowa Media Grafika)	4.727 eksemp	3000/exp	14.181.000	- Tidak dilampirkan SK Penetapan Penyaluran ke OPD, disetiap bulannya. - Tidak melampirkan dokumentasi.
5.	BKU : 00694/GU, kode rek 5.1.02.02.01.0055, tanggal 22 Juni 2023,	Belanja langganan koran Harian "SINDO" untuk bulan januari 2023, nopes:sesuai SPK 748/885/HUMAS- IKP/Diskominfo-SP Tanggal 3 Januari 2023,PPTK:Yossi Yoanna, S.IP, M.AP an.pimp Manajer Sirkulasi, Moh Ardi (PT Media Nusantara Sulawesi)	990 eksemp	4000/exp	3,960,000	- Tidak dilampirkan SK Penetapan Penyaluran ke OPD, disetiap bulannya. - Tidak melampirkan dokumentasi.
6	BKU : 00695/GU, kode rek 5.1.02.02.01.0055, tanggal 22 Juni 2023,	Belanja langganan koran Harian "Rakyat Sulsel" untuk bulan januari 2023, nopes:sesuai SPK 748/1456/humas- IKP/Diskominfo-SP Tanggal 3 Januari 2023,PPTK:Yossi Yoanna, S.IP, M.AP an.pimp red/ Ismi Aulia Fauzi.	484 eksemp	3000/exp	1.452.000	- Tidak dilampirkan SK Penetapan Penyaluran ke OPD, disetiap bulannya. - Tidak melampirkan dokumentasi.
7	BKU: 00696/GU, kode rek 5.1.02.02.01.0055, tanggal 22 Juni 2023,	Belanja langganan koran Harian "Majalah Tempo" untuk bulan januari 2023, nopes:sesuai SPK 748/921/humas- IKP/Diskominfo-SP Tanggal 3 Januari 2023,PPTK:Yossi Yoanna, S.IP, M.AP an.pimp red Muh Abdah Al Dien	75 eksemp	50.000/ ex	3.750.000	- Tidak dilampirkan SK Penetapan Penyaluran ke OPD, disetiap bulannya. - Tidak melampirkan dokumentasi.
8	BKU : 00697/GU, kode rek 5.1.02.02.01.0055, tanggal 22 Juni 2023,	Belanja langganan koran Harian "FAJAR" untuk bulan januari 2023, nopes:sesuai SPK 748/905/humas- IKP/Diskominfo-SP Tanggal 3 Januari 2023,PPTK:Yossi Yoanna, S.IP, M.AP an.pimp red/ Arsyad Hakim.	4.698 eksemp	5000/exp	23.490.000	- Tidak dilampirkan SK Penetapan Penyaluran ke OPD, disetiap bulannya. - Tidak melampirkan dokumentasi.

No	No.Kwi/ BKU	Uraian Belanja	QTY	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
9	BKU : 00698/GU, kode rek 5.1.02.02.01.0055, tanggal 22 Juni 2023	Belanja langganan koran Harian "Ujung Pandang Ekspres untuk bulan Januari 2023, , nopes:sesuai SPK 748/926/humas-IKP/ Diskominfo-SP Tanggal 3 Januari 2023 PPTK:Yossi Yoanna, S.IP, M.AP an.pimp red Buyung Maksum.	968  eksemp	4000/exp	3.872.000	- Tidak dilampirkan SK Penetapan Penyaluran ke OPD, disetiap bulannya. - Tidak melampirkan dokumentasi.
10	BKU : 00705/GU, kode rek 5.1.02.02.01.0055, tanggal 23 Juni 2023,	Belanja langganan koran Harian "LANGITKU.NET" untuk bulan Januari 2023, nopes:sesuai SPK 748/926/humas-IKP/ Diskominfo-SP Tanggal 6 Maret 2023, PPTK:Yossi Yoanna, S.IP, M.AP an.pimp red Muh Darul Aqsa .	15  artikel  968  eksemp	paket	3.000.000	- Tidak melampirkan dokumentasi, berupa screen shot berita dan jumlah kunjungan.
				<b>Jumlah</b>	<b>58.005.000</b>	

FT

Kondisi tersebut belum sesuai dengan:

a. Pasal 3 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 19 ayat (2) huruf e dan pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa:

- Pasal 3 Ayat (1) "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan".
- Pasal 14 ayat (2) huruf a "PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang; a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran".
- Pasal 19 ayat (2) huruf e "Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang meneliti kelengkapan dokumen pembayaran".

- Pasal 141 ayat (1) “setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
- b. BAB I Huruf G dan H Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa:
  - Huruf G : 3). Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi: a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD; b. **menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;** dan c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa. 5). Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi: a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; b. **menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundangundangan;** dan c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
  - Huruf H : 5). PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang: c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 6). Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan.
- c. Pasal 30 ayat (3), Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 18 Tahun 2021 yang telah dirubah melalui Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2023, tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Personil Lainnya, yang menyatakan bahwa:

Pasal 30

ayat (3): Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai kelengkapan dengan rincian sebagai berikut point c. Pertanggungjawaban uang perjalanan Dinas dengan biaya riil/at cost dilampiri:

5. Bukti biaya rental/sewa kendaraan untuk perjalanan Dinas Dalam Daerah.

Akibatnya:

- a. Pertanggungjawaban belanja sebagaimana daftar tersebut di atas belum diyakini keabsahannya.
- b. Tidak dapat dilakukan pengujian dan evaluasi terhadap keakuratan biaya-biaya dalam melakukan perjalanan dinas yang didasari atas kegiatan tersebut.

**Tanggapan Auditi:**

Bahwa pertanggungjawaban Belanja langganan Koran sejak awal belum pernah ada SK Penetapan penyaluran ke setiap OPD, Pihak penyedia tidak melampirkan dokumentasi dikarenakan tanda terima penyaluran dilampirkan, untuk berikutnya kami akan siapkan SK penyaluran ke setiap OPD di tahun berjalan dan bukti dokumentasi.

**Komentar Tim:**

Untuk bukti penyaluran langganan koran yang dilampirkan belum cukup lengkap, yaitu tidak dalam bentuk tanda terima yang mencantumkan jumlah/volume barang yang dibayarkan secara keseluruhan.

Hal ini disebabkan:

- a. Mekanisme penyaluran langganan koran dari PPTK belum jelas secara teknis bagi penyedia. (04)
- b. PPTK belum cermat dalam menyiapkan/menyusun dokumen pertanggungjawaban atas beban belanja sebagaimana dalam daftar pada uraian diatas. (07)
- c. PPK belum cermat dalam memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban belanja dimaksud. (07)

Disarankan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan memerintahkan secara tertulis kepada:

- a. PPTK langganan koran agar menetapkan mekanisme penyaluran dan jenis bukti penyaluran berupa tanda terima per jenis koran setiap hari penyaluran; (05)

- b. PPTK langganan koran agar kedepannya melengkapi bukti pertanggungjawaban langganan koran sebagaimana maksud uraian diatas yaitu berupa SK penetapan Penetapan Penyaluran ke OPD, disetiap bulannya, Bukti dokumentasi, dan bukti tanda terima secara lengkap; (05)
- c. PPK lebih cermat dalam melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban belanja (08).

**2. Terdapat pembayaran biaya tiket pesawat melebihi Standar Harga Senilai Rp5.427.415,00 dan tidak dilengkapi pernyataan. (05)**

Berdasarkan Hasil penelusuran terhadap dokumen pertanggung jawaban belanja Hibah dari Dinas Kominfo Prov Sulsel kepada KPID Provinsi Sulawesi Selatan TA 2023, diketahui bahwa terdapat pembayaran Biaya pesawat yang melebihi Standar Satuan Harga dan tidak disertai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Atas Kelebihan Biaya Transport, diantaranya sebagai berikut:

No.	Nomor/ Tanggal BKU	Uraian	Tujuan Pesawat	Biaya Tiket Pesawat		Selisih (Rp)
				Pada SPJ (Rp)	Standar Satuan Biaya (Rp)	
1	359/KPID-SS/XII/2023 tgl 18 Desember 2023	Perjalanan Dinas Luar Daerah Komisioner dibebankan pada kegiatan Koordinasi Lembaga pada KPID SulSel sesuai dengan SPPD No.090/100/SPPD/KPID-SS/XII/2023 dan Surat Perintah Tugas No. 094/36/ST/KPID-SS/XII/2023 tgl 13 Desember 2023 Ke Daerah Istimewa Yogyakarta an Mattewakkan,S.IP.,M.Si	D.I. Yogyakarta	5.649.690	3.893.000	1.756.690
	399/KPID-SS/XII/2023 tgl 29 Desember 2023	Perjalanan Dinas Luar Daerah Komisioner dibebankan pada kegiatan Lembaga pada KPID SulSel sesuai dengan SPPD No. 090/055/SPPD/KPID-SS/XI/2022 dan Surat Perintah Tugas No. 094/41/ST/KPID-SS/XII/2023 tgl 20 Desember 2023 an Sitti Hamidah , SE.,MM ke Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	5.470.528	3.831.400	1.639.128
	310/KPID-SS/XII/2023 tgl 29 November 2023	Perjalanan Dinas Luar Daerah dibebankan pada kegiatan Koordinasi Lembaga Pada KPID SulSel sesuai dengan SPPD No.090/065/SPPD/KPID-SS/XI/2023 dan Surat Perintah TugasNo.094/27/ST/KPID-SS/XI/2023tgl 24 November2023 an	Jakarta	4.165.057	3.829.000	336.057

No.	Nomor/ Tanggal BKU	Uraian	Tujuan Pesawat	Biaya Tiket Pesawat		Selisih (Rp)
				Pada SPJ (Rp)	Standar Satuan Biaya (Rp)	
		Inwan Ade Saputra, S.IP.,M.Si Ke Jakarta				
	311/KPID-SS/XII/2023 tgl 29 November 2023	Perjalanan Dinas Luar Daerah dibebankan pada kegiatan Koordinasi Lembaga Pada KPID SulSel sesuai dengan SPPD No.090/066/SPPD/KPID-SS/XI/2023 tgl 29 November 2023 dan Surat Perintah Tugas No094/27/ST/KPID-SS/XI/2023 tgl 24 November 2023 an Abdi Rahmat, SH ke Jakarta	Jakarta	4.415.580	3.829.000	586.580
	312/KPID-SS/XII/2023 tgl 29 November 2023	Perjalanan Dinas Luar Daerah dibebankan pada Kegiatan Koordinasi Lembaga pada KPID SulSel sesuai SPPD No.090/067/SPPD/KPID-SS/XI/2023 tgl 29 November 2023 dan Surat perintah Tugas No094/27/ST/KPID-SS/XI/2023 tgl 24 November 2023 an Dr. Nurmadhani Fitri Suyuti, S.IP.,M.Si Ke Jakarta	Jakarta	4.383.480	3.829.000	554.480
	313/KPID-SS/XII/2023 tgl 29 November 2023	Perjalanan Dinas Luar daerah dibebankan pada kegiatan Koordinasi Lembaga pada KPID SulSel sesuai dengan SPPD No.090/068/SPPD/KPID-SS/XI/2023 tgl 29 November 2023 dan Surat Perintah Tugas No. 094/27/ST/KPID-SS/XI/2023 tgl 24 November 2023 an Siti Hamidah, SE.,MM Ke DKI Jakarta	Jakarta	4.383.480	3.829.000	554.480
					<b>Jumlah</b>	<b>5.427.415</b>

Kondisi ini belum sesuai dengan:

- a. Ayat 6 Pasal 15 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 18 tahun 2021 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan personil lainnya, yang menyatakan bahwa:

Dalam hal biaya transport Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk pergi pulang, melebihi batas maksimal dari standar yang telah ditetapkan maka pada saat menyampaikan pertanggungjawaban, Pelaksana SPPD harus melampirkan

Surat Keterangan Tanggung Jawab Atas Kelebihan Biaya Transport yang formatnya diatur serta ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

- b. Lampiran VIII Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 58// Tahun 2021 tentang penetapan Standar Satuan Harga perjalanan dinas bagi pejabat negara, pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan personil lainnya dalam lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan Satuan biaya Tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi Pulang (PP) yaitu :

- Makassar- Jakarta (PP) Rp 3.829.000,00
- Makassar-DIY (PP) Rp 3.893.000,00
- Makassar- Kalsel (PP) Rp 3.831.400,00

- c. Lampiran XXIX Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 58// Tahun 2021 sebagaimana telah dirubah melalui Lampiran II Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1715/XII/ Tahun 2023: Format Surat Pernyataan Pelampauan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah.

Akibatnya Pertanggungjawaban belanja sebagaimana daftar tersebut di atas belum diyakini keabsahannya.

#### **Tanggapan Auditi:**

Untuk harga tiket pesawat belanja perjalanan dinas pada (BKU 359/KPID, 399/KPID, 310/KPID, 311/KPID, 312/KPID, 313/KPID) bahwa harga tiket pada saat itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan mengingat memasuki hari Natal dan Tahun baru dan musim liburan akhir tahun, sehingga harga tiket melebihi dari standar satuan harga yang telah ditetapkan. Perjalanan dinas komisioner harus dilaksanakan mengingat laporan pertanggung jawaban laporan segera dikumpulkan akhir tahun 2023.

#### **Komentar Tim:**

Pertanggungjawaban Transpertosasi Luar Daerah yang melebihi Standar harga seharusnya dilengkapi bukti harga tiket untuk penerbangan dihari yang sama



pada saat pembelian tiket serta Pernyataan Pelampauan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas.

**Hal ini disebabkan:**

- a. Pelaksana Perjalanan Dinas dan staf Pengelola Keuangan KPID tidak memahami ketentuan perjalanan dinas. (05)
- b. Kurang cermatnya PPTK dalam menyiapkan/menyusun dokumen pertanggungjawaban atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatannya (07).
- c. Kurang cermatnya PPK dalam memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban belanja (07).

Disarankan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan memerintahkan secara tertulis kepada:

- a. KPID Provinsi Sulawesi Selatan untuk pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas sebagaimana pada daftar uraian diatas agar melengkapi Bukti berupa Surat pernyataan pelampauan biaya transportasi Perjalanan dinas luar daerah, disertai bukti harga tiket pada penerbangan lain pada tanggal/hari tersebut dan selanjutnya menyampaikan kepada tim tindak lanjut di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. (08)
- b. PPTK lebih cermat dalam menyiapkan/menyusun dokumen pertanggungjawaban belanja. (08)
- c. PPK lebih optimal dan teliti dalam memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban belanja (08).

**3. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp230.212.490,00 dengan Jumlah Personil dalam satu penugasan Perjalanan Dinas Melebihi Ketentuan. (05)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas, diketahui bahwa terdapat perjalanan dinas sebesar **Rp230.212.490,00** yang jumlah personilnya melebihi ketentuan yaitu:

- a. Perjalanan Dinas dalam rangka melakukan kegiatan kunjungan kerja Penyelenggaraan statistik sektoral lingkup Pemprov pada Ditjend Bina Pembangunan Daerah Kemendagri di Jakarta sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang personil, selama 3 hari kerja mulai tanggal 23 sd. 25

November 2023 sesuai ST Nomor 094/2081/Diskominfo-SP, Tanggal 21 November 2023, sebesar **Rp212.862.490,00** dengan rincian peserta sebagai berikut:

No	BKU & Tgl	Uraian	Pengeluaran (Rp)
1	BKU 2360 Tgl 29/11/2023	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa ke Jakarta Tanggal 23 s/d 25 November 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 094/2081/Diskominfo-SP tanggal 21 November 2023 yang dibebankan pada Sub Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah a.n. ASHERIYANTI TRI PUTRI	7.521.000,00
2	BKU 2361 Tgl 29/11/2023	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa ke Jakarta Tanggal 23 s/d 25 November 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 094/2081/Diskominfo-SP tanggal 21 November 2023 yang dibebankan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD a.n. ROSMINI, SM	7.657.160,00
3	BKU 2362 Tgl 29/11/2023	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa ke Jakarta Tanggal 23 s/d 25 November 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 094/2081/Diskominfo-SP tanggal 21 November 2023 yang dibebankan pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah a.n. ANDI FIRMAN DEGONG, SE	7.657.160,00
4	BKU 2445 Tgl 20/12/2023	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa ke Jakarta tanggal 23 s/d 25 November 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 094/2081/Diskominfo-SP tanggal 21 November 2023 yang dibebankan pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektorial a.n. Hj. HASNAWATI B., SE	7.697.160,00
5	BKU 2446 Tgl 20/12/2023	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa ke Jakarta tanggal 23 s/d 25 November 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 094/2081/Diskominfo-SP tanggal 21 November 2023 yang dibebankan pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi a.n. Hj. SUMIATI, S.Sos	7.657.160,00
6	BKU 2447 Tgl 20/12/2023	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa ke Jakarta tanggal 23 s/d 25 November 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 094/2081/Diskominfo-SP tanggal 21 November 2023 yang dibebankan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD a.n. RANDI	7.497.160,00
7	BKU 2448 Tgl 20/12/2023	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa ke Jakarta tanggal 23 s/d 25 November 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 094/2081/Diskominfo-SP tanggal 21 November 2023 yang dibebankan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD a.n. FEBY SYABRIANTY PARENRENGI	7.497.160,00
8	BKU 2449 Tgl 20/12/2023	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa ke Jakarta tanggal 23 s/d 25 November 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 094/2081/Diskominfo-SP tanggal 21 November 2023 yang dibebankan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD a.n. DIANA YANTI	7.497.160,00

No	BKU & Tgl	Uraian	Pengeluaran (Rp)
9	BKU 2450 Tgl 20/12/2023	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa ke Jakarta tanggal 23 s/d 25 November 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 094/2081/Diskominfo-SP tanggal 21 November 2023 yang dibebankan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor a.n. ARISMIATI, S.I.P	7.657.160,00
10	BKU 2451 Tgl 20/12/2023	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa ke Jakarta tanggal 23 s/d 25 November 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 094/2081/Diskominfo-SP tanggal 21 November 2023 yang dibebankan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor a.n. MUHAMMAD YAUMIL AGUS AWAL., S.Si	7.497.160,00
11	BKU 2452 Tgl 20/12/2023	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa ke Jakarta tanggal 23 s/d 25 November 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 094/2081/Diskominfo-SP tanggal 21 November 2023 yang dibebankan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor a.n. EKA REZKY APRIANY, S.Kom	7.657.160,00
12	BKU 2453 Tgl 20/12/2023	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa ke Jakarta tanggal 23 s/d 25 November 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 094/2081/Diskominfo-SP tanggal 21 November 2023 yang dibebankan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor a.n. ANDI TOALALA SULTHAN PALISURI, SE	7.681.000,00
13	BKU 2454 Tgl 20/12/2023	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa ke Jakarta tanggal 23 s/d 25 November 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 094/2081/Diskominfo-SP tanggal 21 November 2023 yang dibebankan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor a.n. SAHARA	7.657.160,00
14	BKU 2455 Tgl 20/12/2023	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa ke Jakarta tanggal 23 s/d 25 November 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 094/2081/Diskominfo-SP tanggal 21 November 2023 yang dibebankan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor a.n. NUR SANDRI ONGAN, S.Kom	7.497.160,00
15	BKU 2456 Tgl 20/12/2023	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa ke Jakarta tanggal 23 s/d 25 November 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 094/2081/Diskominfo-SP tanggal 21 November 2023 yang dibebankan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor a.n. NIRWANA,SE	7.657.160,00
16	BKU 2457 Tgl 20/12/2023	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa ke Jakarta tanggal 23 s/d 25 November 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 094/2081/Diskominfo-SP tanggal 21 November 2023 yang dibebankan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor a.n. ANDI AISYA PRATIWI	7.497.160,00

No	BKU & Tgl	Uraian	Pengeluaran (Rp)
17	BKU 2458 Tgl 20/12/2023	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa ke Jakarta tanggal 23 s/d 25 November 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 094/2081/Diskominfo-SP tanggal 21 November 2023 yang dibebankan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral a.n. SAGIANTI FITRIAH, SH	7.657.160,00
18	BKU 2459 Tgl 20/12/2023	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa ke Jakarta tanggal 23 s/d 25 November 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 094/2081/Diskominfo-SP tanggal 21 November 2023 yang dibebankan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral a.n. ARDIWAN RUSLI, S.Kom	7.497.160,00
19	BKU 2460 Tgl 20/12/2023	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa ke Jakarta tanggal 23 s/d 25 November 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 094/2081/Diskominfo-SP tanggal 21 November 2023 yang dibebankan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral a.n. AMIVA FATHISYAH NUR, SE	7.497.160,00
20	BKU 2461 Tgl 20/12/2023	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa ke Jakarta tanggal 23 s/d 25 November 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 094/2081/Diskominfo-SP tanggal 21 November 2023 yang dibebankan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral a.n. AMALIAH KARTINI NURHASANAH, SE., M.Si	7.657.160,00
21	BKU 2462 Tgl 20/12/2023	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa ke Jakarta tanggal 23 s/d 25 November 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 094/2081/Diskominfo-SP tanggal 21 November 2023 yang dibebankan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral a.n. AHMAD SYAIFUDDIN, ST., M.I.Kom	7.657.160,00
22	BKU 2463 Tgl 20/12/2023	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa ke Jakarta tanggal 23 s/d 25 November 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 094/2081/Diskominfo-SP tanggal 21 November 2023 yang dibebankan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral a.n. HAERAATI, SS	7.657.160,00
23	BKU 2464 Tgl 20/12/2023	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa ke Jakarta tanggal 23 s/d 25 November 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 094/2081/Diskominfo-SP tanggal 21 November 2023 yang dibebankan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral a.n. ANDI DIAH ISMIRANTI BASO, SE., M.Si	7.897.160,00
24	BKU 2465 Tgl 20/12/2023	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa ke Jakarta tanggal 23 s/d 25 November 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 094/2081/Diskominfo-SP tanggal 21 November 2023 yang dibebankan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral a.n. SYAMSUL RIZAL, SE	7.657.160,00

No	BKU & Tgl	Uraian	Pengeluaran (Rp)
25	BKU 2466 Tgl 20/12/2023	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa ke Jakarta tanggal 23 s/d 25 November 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 094/2081/Diskominfo-SP tanggal 21 November 2023 yang dibebankan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral a.n. EVA ROSSON	7.657.160,00
26	BKU 2467 Tgl 20/12/2023	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa ke Jakarta tanggal 23 s/d 25 November 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 094/2081/Diskominfo-SP tanggal 21 November 2023 yang dibebankan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral a.n. ABD. JABBAR	7.497.160,00
27	BKU 2468 Tgl 20/12/2023	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa ke Jakarta tanggal 23 s/d 25 November 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 094/2081/Diskominfo-SP tanggal 21 November 2023 yang dibebankan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral a.n. FADHILAH MEUTHIA KAHAR, SH	7.521.000,00
28	BKU 2439 Tgl 18/12/2023	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa ke Jakarta tanggal 23 s/d 25 November 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 094/2081/Diskominfo-SP tanggal 21 November 2023 yang dibebankan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD a.n. ERNI, S.Sos., M.Si	7.527.650,00
		<b>Jumlah</b>	<b>212.862.490,00</b>

FT

- b. Staf KPID melakukan Perjalanan Dinas dalam rangka kunjungan kerja koordinasi sebanyak 4 (empat) orang personil sesuai SPT No. 094/21.3/ST/KPID-SS/XI/2023 tgl 8 Nov 2023 untuk satu tujuan penugasan di Kab Wajo sebesar **Rp7.200.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

No	BKU & Tgl	Uraian	Jumlah
1	293/KPID-SS/XI/2023 tanggal 13 November 2023	Perjalanan Dinas an Siska Wardia ke Kab. Wajo. dibebankan pada Belanja KPID 2023. SPPD No 090/061.10/SPPD/KPID-SS/XI/2023 tgl 8 Nov 2023,	1.800.000
2	294/KPID-SS/XI/2023 tanggal 13 November 2023	Perjalanan Dinas an Nurhadijah ke Kab. Wajo. dibebankan pada Belanja KPID 2023. SPPD No 090/061.11/SPPD/KPID-SS/XI/2023 tgl 8 Nov 2023	1.800.000
3	295/KPID-SS/XI/2023 tanggal 13 November 2023	Perjalanan Dinas an Ahyuni Aminuddin, S.Kom ke Kab. Wajo. dibebankan pada Belanja KPID 2023. SPPD No 090/061.14/SPPD/KPID-SS/XI/2023 tgl 8 Nov 2023	1.800.000
4	296/KPID-SS/XI/2023 tanggal 13 November 2023	Perjalanan Dinas an Alamsyah Putra Kamal ke Kab. Wajo. dibebankan pada Belanja KPID 2023. SPPD No 090/061.13/SPPD/KPID-SS/XI/2023 tgl 8 Nov 2023	1.800.000
		<b>Jumlah</b>	<b>7.200.000</b>

- c. Staf KPID melakukan Perjalanan Dinas dalam rangka kunjungan kerja koordinasi sebanyak 5 (lima) orang personil sesuai SPT No. 094/21.2/ST/KPID-SS/XI/2023 tgl 1 Nov 2023 untuk satu tujuan penugasan mendampingi Ketua KPID Sulsel (Irwan Ade Ade Saputra, S.IP., M.Si) dalam kunjungan kerja ke Kominfo Kab. Pinrang dan Radio Suara Bumi Lasinran di Kab Pinrang sebesar Rp10.150.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	BKU	Uraian	Jumlah
1	301/KPID-SS/XI/2023 tanggal 23 November 2023	Perjalanan Dinas an Nurhadiyah S.Sos ke Kab. Pinrang. dibebankan pada Belanja KPID 2023. SPPD No 090/061.5/SPPD/KPID-SS/XI/2023 tgl 1 Nov 2023,	2.030.000
	302/KPID-SS/XI/2023 tanggal 23 November 2023	Perjalanan Dinas an Ahyuni Aminuddin ke Kab. Pinrang. dibebankan pada Belanja KPID 2023. SPPD No 090/061.7/SPPD/KPID-SS/XI/2023 tgl 1 Nov 2023,	2.030.000
3	303/KPID-SS/XI/2023 tanggal 23 November 2023	Perjalanan Dinas an Sitti Ainun Fatimah ke Kab. Pinrang. dibebankan pada Belanja KPID 2023. SPPD No 090/061.6/SPPD/KPID-SS/XI/2023 tgl 1 Nov 2023,	2.030.000
4	304/KPID-SS/XI/2023 tanggal 23 November 2023	Perjalanan Dinas an Edo Yulian Pratama ke Kab. Pinrang. dibebankan pada Belanja KPID 2023. SPPD No 090/061.9/SPPD/KPID-SS/XI/2023 tgl 1 Nov 2023,	2.030.000
5	305/KPID-SS/XI/2023 tanggal 23 November 2023	Perjalanan Dinas an. Alamsyah Putra Kamal, ST ke Kab. Pinrang. dibebankan pada Belanja KPID 2023. SPPD No 090/061.8/SPPD/KPID-SS/XI/2023 tgl 1 Nov 2023,	2.030.000
		<b>Jumlah</b>	<b>10.150.000</b>

JD

Kondisi ini belum sesuai dengan pasal 7 Ayat 10, pasal 28 dan pasal 29 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 18 tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas bagi pejabat negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan personil lainnya sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 51 Tahun 2023, bahwa:

- a. Pasal 7 Ayat 10

Pengajuan ST untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah lingkup Pemerintah Daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi bagi Pejabat Eselon IV/Pengawas Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Tertentu Jabatan

Fungsional Umum dan PPPK serta Personil Lainnya dapat dilaksanakan apabila mendampingi Pejabat Eselon III dan mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang.

b. Pasal 28

Kegiatan perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan secara sekaligus dengan sasaran peserta, tempat tujuan, dan kinerja yang dihasilkan sama maka pelaksanaan perjalanan dinas dilarang dilakukan secara terpisah-pisah.

c. Pasal 29

Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi dilarang dilaksanakan apabila melebihi 3 (tiga) hari dan/atau 3 (tiga) orang pelaksana SPPD.

Akibatnya menimbulkan pemborosan belanja yang membebani keuangan daerah.

**Tanggapan Auditi:**

a. Untuk Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka melakukan kegiatan kunjungan kerja Penyelenggaraan statistik sektoral lingkup Pemprov pada Ditjend Bina Pembangunan Daerah Kemendagri di Jakarta sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang personil, selama 3 (tiga) hari kerja ditanggapi bahwa untuk itu pada masa mendatang akan dilaksanakan penugasan perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Untuk Staf KPID melakukan perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja koordinasi sebanyak 4 orang personil sesuai SPT No. 094/21.3/ST/KPID-SS/XI/2023 Tgl 8 Nov 2023 untuk satu tujuan penugasan di Kab Wajo dengan tanggapan bahwa:

Melakukan koordinasi dengan kominfo kab. Wajo terkait adanya aduan Masyarakat perihal Lembaga Penyiaran berbayar (LPB) yang tidak berizin, serta koordinasi terkait rencana Kunjungan Audiens Komisioner KPID Sulsel dengan Bupati Wajo untuk melakukan sosialisasi ke Lembaga Penyiaran yang tidak berizin di Kab. Wajo.

- c. Untuk Staf KPID melakukan Perjalanan Dinas dalam rangka kunjungan kerja koordinasi sebanyak 5 (lima) orang personil untuk satu tujuan penugasan di Kab Pinrang dengan tanggapan bahwa mendampingi Ketua KPID Sulsel (Irwan Ade Saputra,S.IP.,M.Si.) dalam kunjungan kerja di Kabupaten Pinrang.

**Komentar Tim:**

- a. Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja Penyelenggaraan statistik sektoral lingkup Pemprov pada Ditjend Bina Pembangunan Daerah Kemendagri di Jakarta sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang personil, sebagaimana tabel diatas merupakan kunjungan konsultasi yang tidak sesuai ketentuan.
- b. Terkait Staf KPID dalam rangka kunjungan kerja dan koordinasi sebanyak 4 orang personil untuk satu tujuan penugasan di Kab Wajo seharusnya merupakan tugas pokok dari Anggota KPID, untuk staf sifatnya hanya mendampingi Anggota KPID.
- c. Terkait Staf KPID melakukan Perjalanan Dinas dalam rangka kunjungan kerja koordinasi sebanyak 5 (lima) orang personil untuk satu tujuan penugasan di Kab Pinrang seharusnya merupakan tugas pokok dari Anggota KPID, untuk staf sifatnya hanya mendampingi Anggota KPID.

Hal ini disebabkan:

- a. Pemahaman PPTK terhadap ketentuan terkait perjalanan dinas masih lemah. (06)
- b. Pemahaman Anggota KPID dan staf pengelola keuangan KPID terhadap ketentuan terkait perjalanan dinas masih lemah. (06)

Disarankan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan agar memerintahkan secara tertulis kepada:

- a. PPTK terkait agar pada penugasan berikutnya jumlah personilnya tidak melebihi 3 (tiga) orang untuk 1 (satu) perjalanan dinas yang sifatnya konsultasi dan koordinasi. (05)



- b. Ketua KPID Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana uraian tabel b dan c diatas agar pada masa mendatang penugasan Staf KPID tidak melebihi jumlah personil 3 (tiga) orang untuk 1 (satu) perjalanan dinas yang sifatnya konsultasi dan koordinasi. (05)

### III. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

#### 1. Terdapat Barang Milik Daerah Yang Rusak Berat Senilai Rp898.204.000,00 Belum terbit SK Penghapusan. (03)

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan diketahui bahwa terdapat BMD telah diusulkan untuk dihapus namun sampai saat ini belum ditindaklanjuti proses penetapan SK penghapusan BMD dengan uraian sebagai berikut:

- a. Kendaraan Dinas roda 2 (dua) dan Roda 4 (empat) yang rusak berat dan sudah tidak lagi digunakan serta telah diusulkan untuk penghapusan senilai Rp519.974.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Plat DD	Merk/Type	Tahun perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Ket.
1	Mini Bus	DD 392 AW	Toyota	1990	70.000.000	Rusak Berat
2	Sepeda Motor	DD 4128	Sususki A100	1996	4.320.000	Rusak Berat
3.	Sepeda Motor	DD 6977 MW	Honda	2006	10.000.000	Rusak Berat
4	Sepeda Motor	DD 4854 CI	Suzuki	2006	10.000.000	Rusak Berat
5	Sepeda Motor	DD 6974 MW	Honda	2007	12.000.000	Rusak Berat
6	Sepeda Motor	DD 6975 MW	Honda	2007	12.000.000	Rusak Berat
7	Station Wagon	DD 207 AP	Toyota	2008	182.000.000	Rusak Berat
8	Station Wagon	DD 402	Toyota	2009	175.000.000	Rusak Berat
9	Sepeda Motor	DD 6919 AS	TVS	2009	14.000.000	Rusak Berat
10	Sepeda Motor	DD 6909 AS	TVS	2009	14.000.000	Rusak Berat
11	Sepeda Motor	DD 6990 IB	Yamaha Automatic	2010	16.654.000	Rusak Berat
				<b>Jumlah</b>	<b>519.974.000</b>	

(AM)

- b. BMD telah diusulkan penghapusan Barang Milik Daerah dengan surat usulan Nomor: 032/2633/Diskominfo-sp, Tanggal 27 Mei 2024 ke Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan total nilai perolehan Rp378.230.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Barang	Kode Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Perolehan (Rp)	Kondisi Barang
1	2	3	4	5	6	7	8 (6 x 7)	12
1	02.03.01.02.003	'000001	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) / Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1990	1	17.000.000	17.000.000	Rusak Berat
2	02.06.03.02.001	'000037	P.C Unit/ Komputer PC/P.C Unit/ Komputer PC	2005	1	17.000.000	17.000.000	Rusak Berat
3	02.06.04.01.006	000006-000008	Meja Kerja Pejabat Eselon IV/ Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2007	3	1.250.000	3.750.000	Rusak Berat
4	02.06.04.01.006	'000021	Meja Kerja Pejabat Eselon IV/Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2008	1	4.935.000	4.935.000	Rusak Berat
5	02.06.04.01.008	000002-000006	Meja Kerja Pegawai Non Struktural / Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2008	5	1.850.000	9.250.000	Rusak Berat
6	1.3.2.02.01.04.001	'000001	Sepeda Motor	1996	1	4.320.000	4.320.000	Rusak Berat
7	1.3.2.02.01.04.001	'000003	Sepeda Motor	2006	1	10.000.000	10.000.000	Rusak Berat
8	1.3.2.02.01.04.001	'000004	Sepeda Motor	2006	1	10.000.000	10.000.000	Rusak Berat
9	1.3.2.02.01.04.001	'000005	Sepeda Motor	2007	1	12.000.000	12.000.000	Rusak Berat
10	1.3.2.02.01.04.001	'000008	Sepeda Motor	2007	1	12.000.000	12.000.000	Rusak Berat
11	1.3.2.02.01.01.003	'000023	Station Wagon	2008	1	182.000.000	182.000.000	Rusak Berat
12	1.3.2.02.01.04.001	'000010	Sepeda Motor	2009	1	14.000.000	14.000.000	Rusak Berat
13	1.3.2.02.01.04.001	'000011	Sepeda Motor	2009	1	14.000.000	14.000.000	Rusak Berat
14	1.3.2.02.01.04.001	'000016	Sepeda Motor	2010	1	14.975.000	14.975.000	Rusak Berat
						<b>Jumlah</b>	<b>378.230.000</b>	

AM

Kondisi ini belum sesuai dengan :

- a. Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Daerah yang menyatakan bahwa:
  - 1) Pembukuan BMD atas penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf n dilakukan apabila telah ditetapkan keputusan penghapusan BMD oleh pejabat yang berwenang.
  - 2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:
  - Pasal 12
    - 1) Kepala SKPD selaku pengguna barang
    - 3) Pengguna barang sebagaimana dimaksud ayat 1, berwenang dan tanggung jawab:
      - h. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.
  - Pasal 16 ayat 2 berbunyi pengurus barang pengguna sebagaimana dimaksud ayat 1, berwenang dan bertanggung jawab:
    - g. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah
  - Pasal 17 ayat 3 berbunyi Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud ayat 1, berwenang dan bertanggung jawab:
    - g. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah
- c. Bab VII angka 7.2.2. huruf A poin 18), Lampiran I Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, menyatakan:  
Bab VII angka 7.2.2. Aset Lainnya

#### A. Definisi

- 18) Pos aset lain-lain menampung aset tetap milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah tidak digunakan untuk operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan tidak digunakan oleh masyarakat.

Akibatnya:

- a. Salah saji pencatatan dalam laporan keuangan sebagai Aset tetap Kendaraan yang kondisinya telah mengalami rusak berat dan tidak dapat lagi difungsikan;
- b. BMD yang rusak berat tersebut memerlukan gudang/ruangan/tempat penyimpanan dan tetap memerlukan pengamanan fisik dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **Tanggapan Auditi:**

Belum Terbit SK Penghapusan dari Bidang Aset BKAD Provinsi Sulawesi Selatan (Dalam Proses).

Hal ini disebabkan pihak Pengurus Barang Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dalam kondisi menunggu tindak lanjut dari pihak Bidang Aset BKAD yaitu proses penilaian Tim Appraisal untuk menghitung nilai barang yang akan dihapus untuk proses selanjutnya. (07)

Disarankan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan memerintahkan agar memerintahkan secara tertulis kepada Pengurus Barang untuk lebih optimal berkoordinasi dengan Bidang Aset BKAD terkait efektifitas proses penghapusan Barang Milik Daerah. (05)

#### **2. Terdapat Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua yang tidak dihimpun/disimpan BPKB Serta STNK-nya. (04)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan aset pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian serta konfirmasi dengan Pengurus Barang diketahui bahwa terdapat kendaraan roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) yang tidak ditemukan Bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dan surat tanda nomor kendaraan (STNK), baik berupa Fotocopy/Salinan dokumen

kepemilikan barang milik daerah maupun dokumen asli. Adapun kendaraan dimaksud sebagai berikut:

No	Nama Barang	Merek/Tipe	Tahun	Polisi	Jatuh Tempo (pajak)	Masa STNK/Plat
1	Sepeda Motor/Sepeda Motor	Yamaha Automatic	2010	DD 6983 IB	22/04/2020	22/04/2020
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) / Station Wagon	Toyota, Innova	2013	DD 1612 UC / DD 268 AH	24/12/2023	24/12/2023
3	Sepeda Motor/Sepeda Motor	Yamaha Xeon	2013	DD 2993 / DD2136RA	31/05/2019	31/05/2020
4	Station Wagon/Station Wagon	Kijang Innova	2014	DD 1520 IW / DD 246 AI	20/08/2020	20/08/2024
5	Sepeda Motor/Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	New Blade/ Honda	2014	DD 4243 XY / DD 6825 IP	31/12/2022	31/12/2024
6	Sepeda Motor/Sepeda Motor	Honda Beet CBS / Roda 2	2014	DD 6964 IP	29/01/2023	29/01/2025
7	Sepeda Motor/Sepeda Motor	Yamaha	2014	DD 4396 MQ	20/01/2022	20/01/2025
8	Sepeda Motor/Sepeda Motor	Yamaha	2016	DD 6974IZ / DD 5385 MW	24/11/2022	24/11/2026
9	Station Wagon/Station Wagon	TOYOTA	2017	DD 1179 XAA / DD 1858 SD	29/01/2023	29/01/2025
10	Station Wagon/Station Wagon	TOYOTA	2017	DD 1844 XAA / DD 1688 RL	28/07/2023	28/07/2027
11	Sepeda Motor/Sepeda Motor	YAMAHA N-MAX NONABS	2016	DD 6882 QZ	27/04/2022	27/04/2022
12	Sepeda Motor/Sepeda Motor	YAMAHA N-Max Non ABS	2017	DD 5619 QG	13/03/2023	13/03/2023
13	Sepeda Motor/Sepeda Motor	YAMAHA	2017	DD 5622 QG	13/03/2023	13/03/2023
14	Station Wagon/Station Wagon	Avanza	2011	DD 1728 RA / DD 290 AK	29/12/2023	29/12/2026
15	Sepeda Motor/Sepeda Motor	Yamaha Lexi	2018	DD 6933 UY	24/12/2023	24/12/2023
16	Sepeda Motor/Sepeda Motor	Yamaha Lexi	2018	DD 6983 UT	12/12/2023	12/12/2023
17	Sepeda Motor/Sepeda Motor	Yamaha Lexi	2018	DD 6934 UY	24/12/2023	24/12/2023
18	Sepeda Motor/Sepeda Motor	Yamaha N-Max	2018	DD 6983 UQ	21/12/2023	21/12/2023
19	Sepeda Motor/Sepeda Motor	Yamaha N-Max	2018	DD 6983 UR	21/12/2023	21/12/2023

(AM)

Kondisi tersebut belum sesuai dengan:

- Pasal 308 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan barang milik daerah bahwa:

Pasal 308

- (1) Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan, dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut:
    - a. Bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB);
    - b. Fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK);
    - c. Berita Acara Serah Terima (BAST);
    - d. Kartu pemeliharaan;
    - e. Data daftar barang; dan
    - f. Dokumen terkait lainnya yang diperlukan.
  - (2) Pengamanan hukum Kendaraan Dinas dilakukan, antara lain:
    - a. melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, seperti BPKB dan STNK, termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
    - b. melakukan pemrosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan dinas bermotor.
- Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 151/II/Tahun 2024 tentang Penetapan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna/ Pengurus Barang Pembantu dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.
- b. Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna :
- (4) membantu mengamankan barang milik daerah yang berada di pengguna barang
  - (11) menyiapkan dokumen antara lain: Fotocopy/Salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/ fotocopy/ Salinan dokumen penatausahaan.

Akibatnya:

- a. Terjadi tunggakan pajak kendaraan bermotor sejak Tahun 2020, dan kesulitan dalam melakukan pembayaran pajak yang sudah jatuh tempo serta akan menimbulkan denda pajak yang lebih besar.

- b. Pengamanan Administrasi dan Pengamanan Hukum terhadap Kendaraan Dinas tersebut tidak terjamin.

**Tanggapan Auditi:**

Sementara di Proses di Bidang Aset BKAD Provinsi Sulawesi Selatan (Pencarian).

Hal ini disebabkan lemahnya koordinasi pengurus barang dengan pihak terkait dalam hal penghimpunan STNK dan foto copy BPKB Kendaraan Dinas (05)

Disarankan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan memerintahkan secara tertulis kepada Sekretaris untuk mengkoordinir pengurus barang agar menghimpun foto copy BPKB dan STNK atau mengurus penerbitan STNK bagi Kendaraan dinas sebagaimana dalam daftar diatas. (05)

**3. Terdapat 28 (dua puluh delapan) Unit Kendaraan Dinas Roda Dua dan Roda Empat yang Menunggak Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp30.937.500.00. (05)**

Dari hasil pemeriksaan Dokumen Pajak Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat 28 (dua puluh delapan) unit kendaraan roda empat dan roda dua yang menunggak pajak kendaraan bermotor, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Merek/Tipe	Tahun	No Polisi	Harga	Keterangan	Tunggakan (Rp)
1	Sepeda Motor/ Sepeda Motor	Yamaha Automatic	2010	DD 6983 IB	14.975.000	Kendaraan Operasional Bidang Humas	749.000
2	Station Wagon/ Station Wagon	Mitsubishi	2012	DD 1756 XE / DD 46	421.600.000	Kendaraan Operasional Sekretariat	3.774.500
3	Sepeda Motor/Sepeda Motor	Yamaha	2012	DD 6921 RZ	16.654.000	Operasional Bidang Statistik	293.000
4	Station Wagon/ Station Wagon	Avanza	2013	DD 1775 KO	174.700.000	Komisis Informasi	794.000
5	Station Wagon/ Station Wagon	Avanza	2013	DD 1829 QU	174.700.000	Komisis Informasi	794.000

No	Nama Barang	Merek/Tipe	Tahun	No Polisi	Harga	Keterangan	Tunggakan (Rp)
6	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) / Station Wagon	Toyota, Innova	2013	DD 1612 UC/ DD 268 AH	281.700.000	Operasional Bidang Humas Humas	1.589.500
7	Sepeda Motor/ Sepeda Motor	Yamaha Xeon	2013	DD 2993/ DD 2136 RA	16.348.000	Operasional Bidang Sekretariat	278.000
8	Station Wagon/Station Wagon	Mitsubishi, Outlander	2014	DD 1846 XB / DD 81	347.543.000	Operasional Sekretariat	1.452.500
9	Station Wagon/ StationWagon	Kijang Innova	2014	DD DD 1520 IW / DD 246 AI	247.400.000	Kendaraan Operasional Bidang Humas	5.674.000
10	Multi Purpose Vehicle (MPV) / Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	TOYOTA	2014	DD 1476 VG	218.600.000	Kendaraan Operasional BidangHumas	2.332.500
11	Sepeda Motor/Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	New Blade/ Honda	2014	DD 4243 XY/DD 6825 IP	15.935.000	Operasional Sekretariat	258.000
12	Sepeda Motor/ Sepeda Motor	Honda Beet CBS / Roda Dua	2014	DD 6964 IP	15.700.000	Operasional Sekretariat	244.000
13	Sepeda Motor/ Sepeda Motor	Yamaha	2014	DD 4396 MQ	16.929.000	Operasional Bidang Statistik	404.500
14	Sepeda Motor/ Sepeda Motor	Yamaha	2016	DD 6974 IZ/DD 5385 MW	16.936.300	Operasional Bidang Persandian	259.500
15	Station Wagon/ Station Wagon	TOYOTA	2017	DD 1179 XAA / DD 1858 SD	332.500.000	Kendaraan Dinas Jabatan Kabid Humas	1.525.000
16	Station Wagon/ Station Wagon	TOYOTA	2017	DD DD 1844 XAA / DD 1688 RL	524.200.000	Kendaraan Operasional Bidang Humas	2.562.000
17	Sepeda Motor/ Sepeda Motor	YAMAHA N- MAX NON ABS	2016	DD 6882 QZ	26.040.600	Kendaraan Operasional Bidang Persandian	651.000
18	Sepeda Motor/ Sepeda Motor	YAMAHA N- Max Non ABS	2017	DD 5619 QG	27.158.600	Kendaraan Operasional Bidang Aptika	499.000
19	Sepeda Motor/ Sepeda Motor	YAMAHA	2017	DD 5622 QG	27.158.600	Kendaraan Operasional Sekretariat	499.000
20	Station Wagon/ Station Wagon	Toyota All New Kijang Inova 2.0	2018	DD 1698 QD	356.500.000	Kendaraan Jabatan Kabid Persandian	1.592.000
21	Station Wagon /Station Wagon	Avanza	2013	DD 1780 KO / DD 1294 XAA	174.700.000	Komisi Informasi	794.000
22	Station Wagon/ Station Wagon	Avanza	2013	DD 1781 KO/DD 1293	174.700.000	Komisi Informasi	794.000



No	Nama Barang	Merek/Tipe	Tahun	No Polisi	Harga	Keterangan	Tunggakan (Rp)
				XAA			
23	Station Wagon/ Station Wagon	Avanza	2011	DD 1728 RA / DD 290 AK	176.800.000	Komisi Informasi	925.000
24	Sepeda Motor/ Sepeda Motor	Yamaha Lexi	2018	DD 6933 UY	21.175.000	Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat	284.000
25	Sepeda Motor/ Sepeda Motor	Yamaha Lexi	2018	DD 6983 UT	21.175.000	Kendaraan Jabatan Kasubag Program	292.000
26	Sepeda Motor/ Sepeda Motor	Yamaha Lexi	2018	DD 6934 UY	21.175.000	Kendaraan Jabaran Kasubag Umum	284.000
27	Sepeda Motor/ Sepeda Motor	Yamaha N- Max	2018	DD 6983 UQ	27.683.600	Kendaraan Dinas Operasional Bidang Aptika	513.000
28	Sepeda Motor/ Sepeda Motor	Yamaha N- Max	2018	DD 6983 UR	27.683.600	Kendaraan Operasional Sekretariat	327.000
						<b>Jumlah</b>	<b>30.438.000</b>

AM

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 308 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menyatakan bahwa :

“Pengamanan hukum kendaraan dinas antara lain melakukan pengurusan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, seperti BPKB, dan STNK termasuk pembayaran Pajak kendaraan bermotor (PKB).”

Akibatnya:

- a. Keterlambatan penerimaan PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas menimbulkan biaya tambahan berupa Denda;
- c. Kendaraan Dinas tersebut dapat berisiko dihapus Register kendaraannya serta berisiko terkena tilang saat kendaraan dinas digunakan di jalan.

#### **Tanggapan Auditi:**

Sementara dalam proses pembayaran.

Hal ini disebabkan dokumen yang menjadi acuan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor berupa STNK dan foto copy BPKB Kendaraan Dinas tidak sepenuhnya dihimpun oleh Pengurus Barang dan tidak dapat dipastikan ketersediaan anggarannya. (05)

Disarankan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan agar:

- a. Memerintahkan secara tertulis kepada Sekretaris mengkoordinir Pengurus Barang untuk menghimpun surat-surat kendaraan dinas (STNK dan foto copy BPKB) yang menjadi kewenangannya. (05)
- b. Memerintahkan secara tertulis kepada Sekretaris memastikan ketersediaan anggaran pembayaran Pajak Kendaraan Dinas yang menjadi kewenangannya dan selanjutnya segera melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana daftar dalam uraian diatas serta bukti tindak lanjutnya disampaikan kepada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. (05)
- c. Memerintahkan secara tertulis kepada Sekretaris untuk kedepannya melakukan pembayaran pajak kendaraan dinas secara tepat waktu. (05)

### **BAB III. PENUTUP**

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 dan 2024 disampaikan untuk mendapatkan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

**IRBANWIL I,**



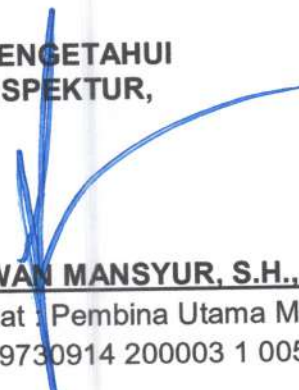
**Hj. ANDI RAHMANIA, SE., M.Si.**  
Pangkat: Pembina Tk. I  
NIP. 19740629 200112 2 003

**PENGENDALI TEKNIS,**



**MUH. KRAMA, S.Sos.**  
Pangkat: Pembina Tk. I  
NIP. 19700202 199103 1 006

**MENGETAHUI  
INSPEKTUR,**



**MARWAN MANSYUR, S.H., M.H.**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19730914 200003 1 005



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Andi Pangerang Pettarani Nomor 100, Makassar 90222

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor: 700/56/Inspektorat

- Berdasarkan :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
  - Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 900/009/I/BKAD tanggal 2 Januari 2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.

**MENUGASKAN :**

No.	Nama/NIP/Pangkat/Gol	Jabatan	Peran
1	<b>MARWAN MANSYUR, SH., MH.</b> 19730914 200003 1 005 / Pembina Utama Muda/ IV.c	Inspektur Daerah	Penanggung Jawab
2	<b>Hj. ANDI RAHMANIA, SE., M.Si.</b> 19740629 200112 2 003 / Pembina Tk. I / IV.b	Irbanwil I	Wakil Penanggung Jawab
3	<b>Ir. MUH. HASRI, M.Si</b> 19640414 199303 1 013 / Pembina Utama / IV.e	Auditor Utama	Pengendali Mutu
4	<b>MUH. IKRAMA, S.Sos</b> 19700202 199103 1 006 / Pembina / IV.a	PPUPD Madya	Pengendali Teknis
5	<b>MISBAHUDDIN ANAS, S.E., M.Ak., CFA</b> 19771118 200604 1 010 / Pembina Tk.I / IV.b	Auditor Madya	Ketua Tim
6	<b>BAHARUDDIN, S.STP</b> 19770209 199511 1 001/ Pembina Tk.I / IV.b	Auditor Muda	Anggota Tim
7	<b>Hj. ANDI MUTIA JUSTICIA I.C., S.E., Msi</b> 19760127 200901 2 002 / Penata Tk.I / III.d	PPUPD Pertama	Anggota Tim
8	<b>FATMAWATI, S.H</b> 19810224 201111 2 001 / Penata Muda Tk.I/ III.b	Auditor Pertama	Anggota Tim
9	<b>JANA DIANA, S.Si., M.M</b> 19820125 200804 2 003/ Penata Tk.I / III/d	PPUPD Pertama	Anggota Tim

- Untuk :
- Melakukan Pemeriksaan/Audit Ketaatan dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2024 melalui Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada **Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.SulSel**
  - Surat Perintah ini berlaku :
    - 2 (dua) hari, dari tanggal 13 s.d 14 Juni 2024 Survey Pendahuluan dan PKA
    - 8 (delapan) hari dari tanggal 19 s.d 28 Juni 2024 Audit Ketaatan dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2024 dan hasilnya dilaporkan pada kesempatan pertama.
  - Biaya yang dipergunakan dalam pelaksanaan Surat Perintah ini, dibebankan pada DPA OPD Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 melalui Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (6.01.02.1.01.02 - 5.1.02.04.01.0001 - UKP
  - Jenis Transportasi yang digunakan: Angkutan Darat.

***"Personil/Pemeriksa dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun baik langsung atau tidak langsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya"***

Demikian Surat Perintah Tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 13 Juni 2024

Inspektur,



**MAKWAN MANSYUR, S.H., M.H**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. : 19730914 200003 1 005

Tembusan: Kepada Yth.

- Pj. Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar;



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Andi Pangerang Pettarani Nomor 100, Makassar 90222  
Telp. 0411-453137 - Surel: inspektoratprovsulsel@gmail.com

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor: 094/489 / B.1/Itprov

- Berdasarkan :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  2. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 900/009/I/BKAD tanggal 2 Januari 2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.

**MENUGASKAN :**

No.	Nama/NIP/Pangkat/Gol	Jabatan	Peran
1	Hj. ANDI RAHMANIA, SE., M.Si 19740629 200112 2 023 Pembina Tk. I/IV.b	Inspektur Pembantu Wilayah I	Wakil Penanggung Jawab
2	Ir. MUHAMMAD HASRI, M.Si 19640414 199303 1 013 Pembina Utama / IV.e	Auditor Utama	Pengendali Mutu
3	MISBAHUDDIN, S.E., M.Ak., CFA 19771118 200604 1 010 Pembina Tk.I/ IV.b	Auditor Madya	Ketua Tim
4	ANDI MUTIA JUSTICIA, I.C., M.Si 19760127 200901 2 002 Penata Tk.I. /III.d	Auditor Muda	Anggota Tim

- Untuk :
1. Melakukan Pemeriksaan/Cek Fisik/Uji Petik Program/Kegiatan pada **Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Prov. Sulsel** bertempat di **Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru, Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap.**
  2. Surat Perintah ini berlaku **5(lima) hari**, dari tanggal **1 s.d 5 Juli 2024** dan hasil pelaksanaannya dilaporkan pada kesempatan pertama;
  3. Biaya yang dipergunakan dalam pelaksanaan Surat Perintah ini, dibebankan pada DPA OPD Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 melalui Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (6.01.02.1.01.02 - 5.1.02.04.01.0001 - UKP);
  4. Jenis Transportasi yang digunakan: Angkutan Darat.

**"Personil Tidak Menerima Fasilitas/ Pelayanan dalam bentuk apapun dalam pemeriksaan dari pihak manapun baik langsung atau tidak langsung"**

Demikian Surat Perintah Tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 18 Juni 2024

INSPEKTUR,

**MARWAN MANSYUR, SH., MH.**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19730914 200003 1 005

Tembusan: Kepada Yth.

1. Pj. Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar;
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar;
3. Pertinggal.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Andi Pangerang Pettarani Nomor 100, Makassar 90222  
Telp. 0411-453137 - Surel: inspektoratprovssulsel@gmail.com

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor: 094/ **488** / B.1/Itprov

- Berdasarkan :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  2. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 900/009/1/BKAD tanggal 2 Januari 2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.

**MENUGASKAN :**

No.	Nama/NIP/Pangkat/Gol	Jabatan	Peran
1	<b>MUHAMMAD IKRAMA, S.Sos</b> 19700202 199103 1 006 Pembina Tk. I/IV.b	PPUPD Madya	Pengendali Teknis
2	<b>BAHARUDDIN, S.STP</b> 19770209 199511 1 001 Pembina Tk. I / IV.b	PPUPD Madya	Anggota Tim
3	<b>FATMAWATI, SH</b> 19810224 201111 2 001 Penata Muda Tk.I/ III.b	Auditor Peratama	Anggota Tim
4	<b>JANA DIANA, S.Si., MM</b> 19820125 200804 2 003 Pembina. /IV.a	PPUPD Pertma	Anggota Tim

- Untuk :
3. Melakukan Pemeriksaan/Cek Fisik/Uji Petik Program/Kegiatan pada **Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Prov. Sulsel** bertempat di **Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bone**.
  4. Surat Perintah ini berlaku **5(lima) hari, dari tanggal 1 s.d 5 Juli 2024** dan hasil pelaksanaannya dilaporkan pada kesempatan pertama;
  5. Biaya yang dipergunakan dalam pelaksanaan Surat Perintah ini, dibebankan pada DPA OPD Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 melalui Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (6.01.02.1.01.02 - 5.1.02.04.01.0001 - UKP);
  6. Jenis Transportasi yang digunakan: Angkutan Darat.

**"Personil Tidak Menerima Fasilitas/ Pelayanan dalam bentuk apapun dalam pemeriksaan dari pihak manapun baik langsung atau tidak langsung"**

Demikian Surat Perintah Tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Makassar  
Pada Tanggal : **28** Juni 2024

**INSPEKTUR,**

**MAK WAN MANSYUR, SH., MH.**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19730914 200003 1 005

Tembusan: Kepada Yth.

1. Pj. Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar;
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar;
3. Bertinggal.



**LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAERAH DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIKA DAN PERSANDIAN  
TAHUN ANGGARAN 2023 s/d 2024**

Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Komunikasi Dan Informatik, Statistik dan Persandian Prov. Sulsel TA 2023 & 2024 Pada Dinas Kominukasi Informatika Statistik Dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 700.04/2592/B.I/ITPROV Tanggal 30 Juli 2024 dengan ini telah diambil langkah tindak lanjut sebagai berikut :

**1. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH**

**a. Terdapat Belanja Kegiatan Yang Belum Cukup Dilengkapi Bukti Pertanggungjawaban Senilai Rp. 58.005.000**

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban periode bulan Juni 2023 s/d Mei 2024, ditemukan bahwa terdapat belanja yang bukti pertanggungjawabannya belum cukup lengkap yaitu Belanja Langganan Koran / Media Cetak / Elektronik dan Media Online, pada sub kegiatan pengelolaan media komunikasi public, yang tidak dilengkapi bukti yang cukup sebesar Rp.58.005.000

**TANGGAPAN :**

Belanja Langganan Koran / Media Cetak / Elektronik dan Media Online, pada sub kegiatan pengelolaan Media Komunikasi Publik, yang tidak dilengkapi bukti yang cukup, sebagai berikut :

No.	Nomor BKU	Keterangan/Uraian	Nilai	Keterangan	Tanggapan/Jawaban
1	00690	Belanja Langganan Koran Harian "Rakyat Sulsel" untuk bulan januari 2023 Nopes: sesuai SPK 748/1456/humas-ikp/diskominfo-SP Tanggal 3 Januari	3.640.000,00	<ul style="list-style-type: none"><li>Tidak dilampirkan SK Penetapan Penyaluran ke OPD, disetiap bulannya.</li><li>Tidak dilampirkan BA Penyaluran ke yang bersangkutan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Sejak awal belum pernah ada sk penetapan penyaluran ke setiap OPD, untuk berikutnya kami akan siapkan sk penyaluran ke</li></ul>



**Catatan :**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

		2023, PPTK: Yessy Yoanna, S.IP., M.AP an. Pimp red/keu Evi Arvida		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak melampirkan dokumentasi</li> </ul>	<p>setiap OPD di tahun berjalan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanda terima bukti penyaluran terlampir</li> <li>• Pihak penyedia tidak melampirkan dokumentasi dikarenakan tanda terima penyaluran dilampirkan</li> </ul>
2	00691	<p>Belanja Langganan Koran Harian “Radar Makassar” untuk bulan januari 2023</p> <p>Nopes: sesuai SPK 748/895/humas-ikp/diskominfo-SP</p> <p>Tanggal 3 Januari 2023, PPTK: Yessy Yoanna, S.IP., M.AP an. Pimp red/keu Nurfadillah</p>	4.620.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak dilampirkan SK Penetapan Penyaluran ke OPD, disetiap bulannya.</li> <li>• Tidak dilampirkan BA Penyaluran ke yang bersangkutan.</li> <li>• Tidak melampirkan dokumentasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sejak awal belum pernah ada sk penetapan penyaluran ke setiap OPD, untuk berikutnya kami akan siapkan sk penyaluran ke setiap OPD di tahun berjalan</li> <li>• Tanda terima bukti penyaluran terlampir</li> <li>• Pihak penyedia tidak melampirkan dokumentasi dikarenakan tanda terima penyaluran dilampirkan</li> </ul>
3	00692	<p>Belanja Langganan Koran Harian “Berita Kota Makassar”</p>	3.872.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak dilampirkan SK Penetapan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sejak awal belum pernah ada sk penetapan</li> </ul>



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

		<p>untuk bulan januari 2023</p> <p>Nopes: sesuai SPK 748/890/humas-ikp/diskominfo-SP</p> <p>Tanggal 3 Januari 2023, PPTK: Yessy Yoanna, S.IP., M.AP an. Pimp red/keu Jumaki Daraming</p>		<p>Penyaluran ke OPD, disetiap bulannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak dilampirkan BA Penyaluran ke yang bersangkutan.</li> <li>• Tidak melampirkan dokumentasi</li> </ul>	<p>penyaluran ke setiap OPD, untuk berikutnya kami akan siapkan sk penyaluran ke setiap OPD di tahun berjalan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanda terima bukti penyaluran terlampir</li> <li>• Pihak penyedia tidak melampirkan dokumentasi dikarenakan tanda terima penyaluran dilampirkan</li> </ul>
4	00693	<p>Belanja Langganan Koran Harian "Tribun Timur" untuk bulan januari 2023</p> <p>Nopes: sesuai SPK 748/900/humas-ikp/diskominfo-SP</p> <p>Tanggal 3 Januari 2023, PPTK: Yessy Yoanna, S.IP., M.AP an. Pimp Manager Op Sonny Maryanto (PT. Bosowa Media Grafika)</p>	14.181.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak dilampirkan SK Penetapan Penyaluran ke OPD, disetiap bulannya.</li> <li>• Tidak dilampirkan BA Penyaluran ke yang bersangkutan.</li> <li>• Tidak melampirkan dokumentasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sejak awal belum pernah ada sk penetapan penyaluran ke setiap OPD, untuk berikutnya kami akan siapkan sk penyaluran ke setiap OPD di tahun berjalan</li> <li>• Tanda terima bukti penyaluran terlampir</li> <li>• Pihak penyedia tidak melampirkan dokumentasi</li> </ul>



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code



					dikarenakan tanda terima penyaluran dilampirkan
5	00694	<p>Belanja Langganan Koran Harian “Sindo” untuk bulan januari 2023</p> <p>Nopes: sesuai SPK 748/885/humas-ikp/diskominfo-SP</p> <p>Tanggal 3 Januari 2023, PPTK: Yessy Yoanna, S.IP., M.AP an. Pimp Manajer Sirkulasi, Moh. Ardi (PT. Media Nusantara Sulawesi)</p>	3.960.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak dilampirkan SK Penetapan Penyaluran ke OPD, disetiap bulannya.</li> <li>• Tidak dilampirkan BA Penyaluran ke yang bersangkutan.</li> <li>• Tidak melampirkan dokumentasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sejak awal belum pernah ada sk penetapan penyaluran ke setiap OPD, untuk berikutnya kami akan siapkan sk penyaluran ke setiap OPD di tahun berjalan</li> <li>• Tanda terima bukti penyaluran terlampir</li> <li>• Pihak penyedia tidak melampirkan dokumentasi dikarenakan tanda terima penyaluran dilampirkan</li> </ul>
6	0695	<p>Belanja Langganan Koran Harian “Rakyat Sulsel” untuk bulan januari 2023</p> <p>Nopes: sesuai SPK 748/1456/humas-ikp/diskominfo-SP</p> <p>Tanggal 3 Januari 2023, PPTK: Yessy Yoanna, S.IP., M.AP</p>	1.452.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak dilampirkan SK Penetapan Penyaluran ke OPD, disetiap bulannya.</li> <li>• Tidak dilampirkan BA Penyaluran ke yang bersangkutan.</li> <li>• Tidak melampirkan dokumentasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sejak awal belum pernah ada sk penetapan penyaluran ke setiap OPD, untuk berikutnya kami akan siapkan sk penyaluran ke setiap OPD di tahun berjalan</li> </ul>



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

		an. Pimp red/keu Ismi Aulia Fauzi			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanda terima bukti penyaluran terlampir</li> <li>• Pihak penyedia tidak melampirkan dokumentasi dikarenakan tanda terima penyaluran dilampirkan</li> </ul>
7	00696	<p>Belanja Langganan Koran Harian “Majalah Tempo” untuk bulan januari 2023</p> <p>Nopes: sesuai SPK 748/921/humas-ikp/diskominfo-SP</p> <p>Tanggal 3 Januari 2023, PPTK: Yessy Yoanna, S.IP., M.AP</p> <p>an. Pimp red/keu Muh Abdah Al Dien</p>	3.750.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak dilampirkan SK Penetapan Penyaluran ke OPD, disetiap bulannya.</li> <li>• Tidak dilampirkan BA Penyaluran ke yang bersangkutan.</li> <li>• Tidak melampirkan dokumentasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sejak awal belum pernah ada sk penetapan penyaluran ke setiap OPD, untuk berikutnya kami akan siapkan sk penyaluran ke setiap OPD di tahun berjalan</li> <li>• Tanda terima bukti penyaluran terlampir</li> <li>• Pihak penyedia tidak melampirkan dokumentasi dikarenakan tanda terima penyaluran dilampirkan</li> </ul>
8	00967	<p>Belanja Langganan Koran Harian “Fajar” untuk bulan januari 2023</p> <p>Nopes: sesuai SPK</p>	23.490.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak dilampirkan SK Penetapan Penyaluran ke OPD, disetiap bulannya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sejak awal belum pernah ada sk penetapan penyaluran ke setiap OPD, untuk</li> </ul>



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

		748/905/humas- ikp/diskominfo-SP Tanggal 3 Januari 2023, PPTK: Yessy Yoanna, S.IP., M.AP an. Pimp red/keu Arsyad Hakim		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak dilampirkan BA Penyaluran ke yang bersangkutan.</li> <li>• Tidak melampirkan dokumentasi</li> </ul>	<p>berikutnya kami akan siapkan sk penyaluran ke setiap OPD di tahun berjalan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanda terima bukti penyaluran terlampir</li> <li>• Pihak penyedia tidak melampirkan dokumentasi dikarenakan tanda terima penyaluran dilampirkan</li> </ul>
9	00698	Belanja Langganan Koran Harian “Ujung Pandang Ekspres” untuk bulan januari 2023 Nopes: sesuai SPK 748/926/humas- ikp/diskominfo-SP Tanggal 3 Januari 2023, PPTK: Yessy Yoanna, S.IP., M.AP an. Pimp red/keu Buyung Maksum	3.872.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak dilampirkan SK Penetapan Penyaluran ke OPD, disetiap bulannya.</li> <li>• Tidak dilampirkan BA Penyaluran ke yang bersangkutan.</li> <li>• Tidak melampirkan dokumentasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sejak awal belum pernah ada sk penetapan penyaluran ke setiap OPD, untuk berikutnya kami akan siapkan sk penyaluran ke setiap OPD di tahun berjalan</li> <li>• Tanda terima bukti penyaluran terlampir</li> <li>• Pihak penyedia tidak melampirkan dokumentasi dikarenakan tanda</li> </ul>



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

					terima penyaluran dilampirkan
10	00705	Belanja Langganan Koran Harian "langitku.net" untuk bulan januari 2023 Nopes: sesuai SPK 748/926/humas-ikp/diskominfo-SP Tanggal 3 Januari 2023, PPTK: Yessy Yoanna, S.IP., M.AP an. Pimp red/keu Evi Arvida	3.000.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak dilampirkan SK Penetapan Penyaluran ke OPD, disetiap bulannya.</li> <li>• Tidak dilampirkan BA Penyaluran ke yang bersangkutan.</li> <li>• Tidak melampirkan dokumentasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LANGITKU.NET bukan Langganan Koran Harian, tetapi Media Online</li> </ul>

**b. Terdapat Pembayaran Biaya Tiket Pesawat Melebihi Standar Harga Senilai Rp. 5.427.415 Dan Tidak Dilengkapi Pernyataan**

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap dokumen pertanggung jawaban belanja Hibah dari Dinas Kominfo Prov. Sulsel kepada KPID Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2023, diketahui bahwa terdapat pembayaran Biaya pesawat yang melebihi Standar Satuan harga dan tidak disertai dengan Surat Keterangan tanggung Jawab Atas Kelebihan Biaya Transport.

**c. Belanja Perjalanan Dinas Sebesar Rp. 230.212.490 Dengan Jumlah Personal Dalam Satu Penugasan Perjalanan Dinas Melebihi Ketentuan.**

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas, diketahui bahwa terdapat perjalanan dinas sebesar **Rp.230.212.490** yang jumlah personilnya melebihi ketentuan yaitu:

- Perjalanan Dinas dalam rangka melakukan kegiatan kunjungan kerja Penyelenggaraan Statistik Sektorl lingkup Pemprov pada Ditjend Bina Pembangunan Daerah Kemendagri di Jakarta sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) orang personal, selama 3 hari kerja mulai tanggal 23 s.d 25 November 2023 sesuai ST Nomor : 094/2081/Diskominfo-SP, Tanggal 21 November 2023, sebesar **Rp.212.862.490**



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

## TANGGAPAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas Bidang Statistik Diskominfo SP, ditemukan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 220.985.160 dengan jumlah personel dalam satu penugasan perjalanan dinas melebihi standar ketentuan pada kegiatan kunjungan kerja Penyelenggaraan statistik sektoral lingkup Pemprov pada Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri di Jakarta pada tanggal 23 s.d 25 November 2024. Untuk itu pada masa mendatang akan dilaksanakan penugasan perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

- Staf KPID Melakukan Perjalanan Dinas dalam rangka Kunjungan kerja koordinasi sebanyak 4 (empat) orang personal sesuai SPT No. 094/21.3/ST/KPID-SS/XI/2023 tanggal 8 November 2023 untuk satu tujuan penugasan di Kab. Wajo Sebesar **Rp. 7.200.000**

## TANGGAPAN :

1. Melakukan koordinasi dengan Kominfo Kab. Wajo terkait adanya Aduan Masyarakat perihal Lembaga Penyiaran Berbayar (LPB) yang tidak berizin
2. Koordinasi dengan Kominfo dan Pemerintah Kab. Wajo terkait rencana Kunjungan Audiens komisioner KPID Sulsel dengan Bapak Bupati Kab. Wajo untuk melakukan sosialisasi ke Lembaga penyiaran yang tidak berizin di Kab. Wajo

Untuk itu pada masa mendatang akan dilaksanakan penugasan perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku

- Staf KPID melakukan Perjalanan Dinas dalam rangka Kunjungan kerja koordinasi sebanyak 5 (lima) orang personal sesuai SPT No. 094/21/2/ST/KPID-SS/XI/2023 tanggal 1 November 2023 untuk satu tujuan penugasan mendampingi ketua KPID Sulsel (Irwan Ade Saputra, S.IP, M.Si) dalam kunjungan kerja ke Kominfo Kab. Pinrang dan Radio Suara Bumi Lasirang di Kab. Pinrang sebesar **Rp. 10.150.000**

## TANGGAPAN :

1. Mendampingi Ketua KPID Sulsel (Irwan Ade Saputra, S.IP, M.Si) dalam kunjungan kerja ke Kominfo Kab. Pinrang dan Radio Suara Bumi Lasirang.
2. Monitoring dan evaluasi Lembaga penyiaran di Kab. Pinrang



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

Untuk itu pada masa mendatang akan dilaksanakan penugasan perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku

## 2. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

### a. Terdapat Barang Milik Daerah Yang Rusak Berat Senilai Rp. 898.204.000 Belum Terbit SK Penghapusan

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan diketahui bahwa terdapat BMD telah diusulkan untuk dihapus namun sampai saat ini belum ditindaklanjuti proses penetapan SK Penghapusan BMD dengan uraian sebagai berikut :

- Kendaraan Dinas roda 2 (dua) dan Roda 4 (empat) yang rusak berat dan sudah tidak lagi digunakan serta telah diusulkan untuk penghapusan senilai **Rp. 519.974.000**
- BMD telah diusulkan penghapusan Barang Milik Daerah dengan surat Usulan Nomor :032/2633/Diskominfo-SP, Tanggal 27 Mei 2023 ke Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan total nilai perolehan **Rp. 378.230.000**

#### TANGGAPAN :

Terdapat barang milik daerah yang rusak berat senilai 898.204.000 Setelah kami koordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah khususnya bidang Aset usul penghapusan barang milik daerah nomor : 032/2633/Diskominfo-SP, Tanggal 27 Mei 2024 Dinas Kominfo-SP Masih dalam proses dan kami akan terus melakukan koordinasi terkait progres usul penghapusan tersebut.

### b. Terdapat Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua yang tidak dihimpun/disimpan BPKB serta STNK-nya

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan asset pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian serta konfirmasi dengan Pengurus barang diketahui bahwa terdapat kendaraan roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) yang tidak ditemukan Bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dan surat tanda nomor kendaraan (STNK), baik berupa fotocopy/Salinan dokumen.

#### TANGGAPAN :

Terdapat kendaraan roda empat dan dua yang tidak dihimpun/disimpan BPKB dan STNKnya, Setelah dilakukan koordinasi dan pencarian ulang BPKB dengan Bidang Aset telah ditemukan beberapa BPKB sebagaimana yang dimaksud DD



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

6933 UY, DD 6934 UY, DD 6983 UY, DD 6983 UQ, DD 5619 QG, DD 5622 QG, dan DD 268 AH, dan untuk selanjutnya akan dilakukan koordinasi dan pencarian lebih lanjut. Terkait STNK berikut kami lampirkan Dokumentasi STNK Kendaraan dinas Kominfo-SP

**c. Terdapat 28 (dua puluh delapan) Unit Kendaraan Dinas roda Dua dan roda empat yang Menunggak Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 30.937.500**

Dari hasil pemeriksaan Dokumen Pajak kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Pada Dinas Komunikasi informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat 28 (dua puluh delapan) unit kendaraan roda empat dan roda dua yang menunggak pajak kendaraan bermotor.

**TANGGAPAN :**

Terdapat 28 Unit kendaraan dinas roda empat dan dua yang menunggak pajak kendaraan bermotor sebesar 30.937.500

Sehubungan dengan menunggaknya pajak kendaraan Dinas pada Diskominfo dikarenakan belum ditemukannya beberapa BPKB kendaraan bermotore dan setelah dilakukan pencarian ulang dengan bidang aset telah ditemukan beberapa BPKB maka selanjutnya kami akan segera melakukan pembayaran pajak kendaraan yang ada pada Diskominfo-SP

**3. PENUTUP**

Demikian Laporan hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 s/d 2024 disampaikan.

Plh. KEPALA DINAS,

£

**SULTAN RAKIB,S.S,M.M**

**Pangkat : Pembina Tk.I**

**NIP : 19761008 200901 1 007**



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*